



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyusunan Strategi daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah di Tingkat Provinsi untuk pengentasan daerah tertinggal dengan mengacu pada strategis nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, Gubernur menetapkan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan memperhatikan strategis nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disingkat STRANAS-PPDT adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional.
2. Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Nasional yang selanjutnya disingkat RAN-PPDT adalah dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah tertinggal yang disusun dengan memperhatikan STRANAS-PPDT dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah.
3. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi yang selanjutnya disingkat STRADA-PPDT Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat provinsi yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah provinsi.

4. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten yang selanjutnya disingkat STRADA-PPDT Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat kabupaten yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah kabupaten.
5. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Dalam rangka percepatan pembangunan Daerah tertinggal Provinsi ditetapkan STRADA-PPDT Provinsi.

Pasal 3

- (1) STRADA-PPDT Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Isu Kebijakan dan Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - c. Bab III Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - d. Bab IV Program-Kegiatan Strategis Percepatan Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V Strategi Pembinaan Daerah Tertinggal; dan
 - f. Bab VI Penutup.
- (2) STRADA-PPDT Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) STRADA-PPDT Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Gubernur dan Kepala PD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan STRADA-PPDT Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh pelaku usaha/masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Pelaksanaan STRADA-PPDT Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Bappeda.

Pasal 5

- (1) STRADA-PPDT Provinsi menjadi pedoman penyusunan rencana strategis PD terkait.
- (2) Gubernur menetapkan STRADA-PPDT Provinsi yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Provinsi dan memperhatikan STRANAS-PPDT.

Pasal 6

- (1) STRADA-PPDT Provinsi dapat dilakukan penyesuain target dan kebutuhan pendanaan berdasarkan evaluasi paruh waktu dan akhir tahun rencana pembangunan jangka menengah Provinsi.
- (2) penyesuain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RAD-PPDT.

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan STRADA-PPDT Provinsi, dan STRADA-PPDT Kabupaten dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Daerah tertinggal
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 8

Pendanaan penyelenggaraan STRADA-PPDT Provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 September 2023
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 September 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 891

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ADIMAN, SH., M.SI
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2023-2026

STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL PROVINSI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 disusun berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2020-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden 2020-2024. Visi Misi Presiden 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yang diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

RPJPN Tahun 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

- a) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- b) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- c) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- d) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
- g) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial, mengutamakan pendekatan holistik dan tematik yang didasarkan penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada prioritas pembangunan dan lokasi yang paling relevan sesuai dengan pendekatan koridor pertumbuhan dan pemerataan.

Kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 antara lain pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi, melalui:

- a) perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- b) penyediaan sarana-prasarana dasar perumahan, air bersih dan sanitasi, dan listrik;
- c) peningkatan konektivitas transportasi darat, sungai, laut dan udara;
- d) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital; dan
- e) perluasan kerja sama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran, dan perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menjelaskan bahwa daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria:

- a) perekonomian masyarakat;
- b) sumber daya manusia;
- c) sarana-prasarana;
- d) kemampuan keuangan daerah;
- e) aksesibilitas; dan
- f) karakteristik daerah serta dapat dipertimbangkan karakteristik daerah tertentu.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 terdapat 62 (enam puluh dua) kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal tahun 2020-2024. Adapun sebaran daerah tertinggal tahun 2020-2024 adalah 7 (tujuh) kabupaten di wilayah Sumatera, 14 (empat belas) kabupaten di wilayah Nusa Tenggara, 3 (tiga) kabupaten di wilayah Sulawesi, 8 (delapan) kabupaten di wilayah Maluku, dan 30 (tiga puluh) kabupaten di wilayah Papua. Untuk wilayah Sulawesi terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah 3 Kabupaten adalah Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tojo Una Una.

Sebagai bentuk pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal maka perlu disusun Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT). STRANAS-PPDT Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Tengah telah tersusun Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dimana memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam RPJMN Periode 2020-2024 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Pusat.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk itu pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal maka perlu disusun Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT). STRADA-PPDT Tahun 2022-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2022-2026.

Percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai pembangunan kewilayahan dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengutamakan kerja sama dan keterpaduan program dan kegiatan antar perangkat daerah, antara kementerian/lembaga antar pemerintah daerah, serta antara Pemerintah dan badan usaha dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

1. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) tahun 2020 disusun dengan mempertimbangkan ketentuan hukum sebagai berikut:
2. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026;
12. Peraturan Presiden Nomor 105 Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2020-2024;
13. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal 2020-2024;
14. Keputusan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan kabupaten Daerah Tertinggal yang terentaskan Tahun 2015-2019;
15. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan keuangan Daerah; dan
16. Kepmendagri 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan STRADA-PPDT Tahun 2022-2026 dimaksudkan untuk mendorong upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal menjadi daerah tertinggal entas, secara khusus, terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Adapun tujuan STRADA-PPDT Tahun 2022-2026 adalah:

1. Mempercepat pengurangan kesenjangan antar daerah dalam menjamin terwujudnya pemerataan dan keadilan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Mempercepat terpenuhinya kebutuhan dasar serta sarana-prasarana dasar di 3 wilayah Kabupaten daerah tertinggal;
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara pusat dan daerah dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi;
4. Menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai berikut:
 - a. memberikan pedoman tentang upaya-upaya strategis dan afirmasi yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten serta pemangku kepentingan lain dalam menyusun program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak (impact) bukan hanya keluaran kegiatan (output) dengan capaian yang terukur;
 - b. memberikan acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten dalam menyusun STRADA-PPDT Kabupaten; dan
 - c. memberikan acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) provinsi dan kabupaten.

BAB II

ISU, KEBIJAKAN, DAN SASARAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

2.1 Isu Pembangunan Daerah Tertinggal

Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh masyarakat dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik menjadi daerah yang maju dengan masyarakat yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan keamanan bahkan menyangkut hubungan antara daerah tertinggal dengan daerah maju. Disamping itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah. Pembangunan daerah tertinggal amat membutuhkan pendekatan perwilayahan (*regional development approach*) yang bersifat lintas pelaku maupun sektor.

Pada umumnya pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menghasilkan berbagai kemajuan pembangunan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Salah satu permasalahan pembangunan daerah yang dirasakan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu adanya kabupaten kabupaten tertinggal, 3 kabupaten yaitu Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Tojo Una Una. Provinsi Sulawesi Tengah adalah satu satunya Provinsi yang masih terdapat Kabupaten kategori tertinggal.

Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh masyarakat dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik menjadi daerah yang maju dengan masyarakat yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan keamanan bahkan menyangkut hubungan antara daerah tertinggal dengan daerah maju. Disamping itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah.

Pembangunan daerah tertinggal amat membutuhkan pendekatan perwilayahan (*regional development approach*) yang bersifat lintas pelaku maupun sektor.

Pada umumnya pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menghasilkan berbagai kemajuan pembangunan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Salah satu permasalahan pembangunan daerah yang dirasakan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu adanya kabupaten yang hampir semua masuk dalam kategori kabupaten tertinggal, dan hanya 3 kabupaten yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Poso serta Kota Palu yang tidak masuk dalam kategori daerah tertinggal. Hal ini dipengaruhi, umumnya dari potensi wilayah yang belum didayagunakan secara optimal, kebijakan daerah yang tidak mengatasi permasalahan wilayah secara langsung, peluang yang tidak dimanfaatkan secara baik serta ancaman yang tidak diantisipasi. Adapun tujuan percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah:

- a) Mempercepat pengurangan kesenjangan antar daerah
- b) Mempercepat terpenuhinya kebutuhan dasar, serta sarana dan prasarana dasar daerah tertinggal;
- c) Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; dan
- d) Menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan PPDT.

A. Persentase Penduduk Miskin

Perkembangan penduduk miskin di Sulawesi Tengah selama periode 2020–2021 meskipun secara absolut terlihat meningkat, namun secara persentase menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada akhir-akhir periode tersebut angka kemiskinan terlihat berfluktuasi hal ini dapat di lihat pada tabel 2.1 dan 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Tengah
Tahun 2020-2021

No	Kabupaten/Kota	2020		2021		DIF	
		Jumlah Penduduk (Dalam Ribu Jiwa)	%	Jumlah Penduduk (Dalam Ribu Jiwa)	%	Jumlah Penduduk (Dalam Ribu Jiwa)	%
1	Kab. Banggai Kepulauan	16,70	14,04	16,33	13,72	-0,37	-2,98
2	Kab. Banggai	28,16	7,39	30,10	7,83	1,94	-20,33
3	Kab. Morowali	16,50	13,43	17,07	13,75	0,57	-2,75
4	Kab. Poso	40,20	15,45	41,99	15,92	1,79	-24,28
5	Kab. Donggala	53,17	17,39	51,23	16,73	-1,94	-36,44
6	Kab. Tolitoli	30,51	12,85	32,19	13,51	1,68	-17
7	Kab. Buol	22,93	13,93	23,46	14,06	0,53	-8,87

8	Kab. Parigi Moutong	78,76	15,85	76,79	15,28	-1,97	-63,48
9	Kab. Tojo Una-una	25,43	16,39	25,86	16,60	0,43	-8,83
10	Kab. Sigi	30,00	12,45	31,51	13,05	1,51	-16,95
11	Kab. Banggai Laut	11,09	14,60	10,92	14,17	-0,17	3,08
12	Kab. Morowali Utara	18,38	14,10	18,40	13,90	0,02	-4,48
13	Kab. Kota Palu	26,89	6,80	28,60	7,17	1,71	-19,72
14	Sulawesi Tengah	398,73	13,06	404,44	12,18	5,71	-386,55

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 (data diolah)

Tabel 2.2
Data Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kabupaten/Kota	Keluarga					Individu				
		Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4
1.	BANGGAI	35.831	6.613	6.286	11.348	11.584	151.658	33.023	27.854	46.693	44.088
2.	POSO	21.865	5.470	5.483	5.483	5.429	93.982	27.472	24.064	22.168	20.278
3.	DONGGALA	38.245	9.017	7.799	12.092	9.337	168.494	48.912	36.112	49.922	33.548
4.	TOLI TOLI	21.727	6.441	5.736	4.290	5.260	94.829	34.193	24.896	16.816	18.924
5.	BUOL	19.647	4.824	3.359	5.039	6.425	87.643	27.003	15.448	21.071	24.121
6.	MOROWALI	13.663	3.674	2.972	3.950	3.067	57.523	17.680	12.578	15.728	11.537
7.	BANGGAI KEPULAUAN	16.852	3.191	4.515	4.420	4.726	68.046	15.886	19.288	16.842	16.030
8.	PARIGI MOUTONG	60.011	13.726	14.625	17.523	14.137	245.124	69.451	61.561	65.848	48.264
9.	TOJO UNA UNA	26.273	5.132	7.436	8.123	5.582	103.991	25.897	31.145	29.360	17.589
10.	SIGI	27.996	6.404	5.571	7.884	8.137	116.359	32.748	24.250	30.700	28.661
11.	BANGGAI LAUT	10.565	2.283	2.569	4.011	1.702	42.260	11.435	10.948	14.567	5.310
12.	MOROWALI UTARA	17.062	4.129	4.587	4.461	3.885	70.789	21.194	19.453	16.998	13.144
13.	KOTA PALU	24.132	5.885	5.769	6.615	5.863	103.228	29.083	25.027	26.688	22.430
Jumlah		333.869	76.789	76.707	95.239	85.134	1.403.926	393.977	332.624	373.401	303.924

Sumber: P3KE Kemenko PMK Tahun 2022

Perkembangan penduduk desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kabupaten	Jumlah Desa	TAHUN 2022					Kontrol
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
1	BANGGAI	291	7	118	163	3	0	291
2	POSO	142	1	30	103	8	0	142
3	DONGGALA	158	7	67	64	12	8	158
4	TOLITOLI	103	0	23	65	14	1	103
5	BUOL	108	2	42	59	5	0	108
6	MOROWALI	126	3	36	44	43	0	126
7	BANGGAI KEPULAUAN	141	1	9	105	26	0	141
8	PARIGI MOUTONG	278	9	110	151	7	1	278
9	TOJO UNA-UNA	134	2	14	66	48	4	134
10	SIGI	176	8	48	66	51	3	176
11	BANGGAI LAUT	63	0	4	37	22	0	63
12	MOROWALI UTARA	122	2	21	72	27	0	122
JUMLAH		1842	42	522	995	266	17	1842

Sumber: P3KE Kemenko PMK Tahun 2021

B. PDRB Per-Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita memberikan gambaran nilai tambah atas keseluruhan aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh penduduk dalam suatu periode tertentu, atau dengan perkataan lain PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Semakin tinggi nilai PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui sejauhmana tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah dalam lingkup makro, selain itu juga dijadikan sebagai acuan untuk memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa. Sementara distribusi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada perspektif pertumbuhan ekonomi Sulampua tahun 2021 sebesar 15,54 persen meningkat jika dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 13,87 persen, dan distribusi pertumbuhan ekonomi yang tertinggi didominasi oleh Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 34,30 persen. Disisi lain laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 hanya sebesar 4,86 persen, meningkat secara signifikan pada tahun 2021 sebesar 11,70 persen. Pertumbuhan Lapangan Usaha didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 19,62 persen, namun menurun jika dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 23,68 persen, disusul lapangan usaha Konstruksi sebesar 16,88 persen, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2020 hanya sebesar -8,47 persen serta lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,46 persen, juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar -11,05 persen, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Konstan (Persen)

Komponen	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household</i>	6.28	4,99	3	-3,95	2,71
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH</i>	8.89	15,94	8,75	-5,32	1,2
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption Expenditure</i>	3,48	1,45	2,32	-3,12	4,93
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	3.51	1.73	20.35	-7.99	49.10
5. Perubahan Inventori/ <i>Change In Inventories</i>	-52.56	149.20	-	-	7.71
6. Ekspor Luar Negeri/ <i>Export</i>	33.01	151.14	18.35	35.91	28.48
7. Impor Luar Negeri/ <i>Import of Foreign Affairs</i>	11.54	124.14	6.40	-22.06	143.36
8. Net Ekspor Antar Daerah/ <i>Net Inter-Regional Exports</i>	12.08	55.82	23.42	67.23	7.66

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 (data diolah)

C. Pengangguran

Indikator ketenagakerjaan dalam mengukur kinerja kesejahteraan sosial terdiri atas angka partisipasi angkatan kerja, Tingkat partisipasi angkatan kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rasio Penduduk Yang Bekerja selama tahun 2016-2020 di Provinsi Sulawesi Tengah, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.5

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Indikator Kesejahteraan Sosial Terkait
Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

No	Indikator Ketenagakerjaan	Capaian tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Capaian Angka partisipasi angkatan kerja	67,08	68,19	72,55	68,59	69,75
2.	Capaian Tingkat partisipasi angkatan kerja	78,02	72,73	74,81	72,91	69,44
	Target RPJMD 2016-2021	73,75	74,50	70,96	76,75	70,01
3.	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka	3,29	3,81	3,43	3,11	3,77
	Target RPJMD 2016-2021	3,42	3,39	3,75-3,50	3,5-3,25	3,25 -3,0
4.	Capaian Rasio Penduduk Yang Bekerja	96,71	96,19	96,57	96,85	96,23
	Target RPJMD 2016-2021	96,20	96,60	96,50	96,90	97,00

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2017-2021.

Daya serap tenaga kerja di sektor ekonomi dapat dilihat dari besarnya porsi keterlibatan angkatan kerja (yang bekerja) dalam proses kegiatan produksi yang ditunjukkan oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Perkembangan TPAK di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2016- 2020 cenderung fluktuatif dan menurun, yakni pada Tahun 2016 TPAK mencapai 78,02 persen menurun menjadi 72,73 persen pada Tahun 2017, tahun selanjutnya terus menurun hingga menjadi 69,44 persen pada Tahun 2020. Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang periode 2016-2020 juga mengalami perkembangan yang fluktuatif, yakni pada Tahun 2016, TPT sebesar 3,29 persen menurun menjadi 3,77 persen pada Tahun 2020.

Persentase pengangguran terbuka di 3 Kabupaten tertinggal dimana Kabupaten Sigi, Kabupaten TojoUna-una dan kabupaten Donggala yang tertinggi di Tahun 2021 ada di Kabupaten Donggala 3,50% hal ini dapat di lihat pada tabel berikut data pengangguran terbuka Kabupaten/Kota provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 2.6
Persentase Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten/kota	TAHUN	
	2020	2021
Banggai Kepulauan	2,47	2,95
Banggai	2,42	3,57
Morowali	5,21	5,08
Poso	2,39	2,47
Donggala	2,58	3,50
Tolitoli	3,74	3,13
Buol	4,36	3,64
Parigi Moutong	2,7	2,97
Tojo Una-Una	2,84	3,44
Sigi	3,36	2,38
Banggai Laut	3,09	3,35
Morowali Utara	5,16	2,98
Kota Palu	8,38	7,61

D. Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Penerangan Utama

Persentase rumah tangga menurut sumber penerangan utama di Provinsi Sulawesi Tengah pengguna listrik PLN Khususnya di 3 Kabupaten Tertinggal yaitu Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten sigi dan Kabupaten Donggala, yang masih tanpa meteran Kabupaten Sigi 14,26% Lebih baik di dibandingkan Kabupaten Donggala yang hanya mencapai 8,77 di Tahun 2021 hal ini dapat dilihat pada tabel 2.7 dan tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.7

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama Tahun 2020-2021

Kabupaten/Kota	Tahun 2020					Tahun 2021				
	Listrik PLN dengan Meteran	Listrik PLN Tanpa Meteran	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	Total	Listrik PLN dengan Meteran	Listrik PLN Tanpa Meteran	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	Total
Banggai Kepulauan	75,90	13,55	3,81	6,74	100,00	80,44	15,87	0,97	2,72	100,00
Banggai	85,63	13,75	0,17	0,45	100,00	86,58	12,15	0,62	0,65	100,00
Morowali	81,63	7,11	9,96	1,30	100,00	80,50	4,66	13,11	1,72	100,00
Poso	92,52	6,76	0,71	0,00	100,00	89,14	9,37	0,88	0,61	100,00
Donggala	78,96	13,09	6,17	1,78	100,00	80,59	8,77	7,38	3,25	100,00
Tolitoli	82,53	12,77	2,80	1,90	100,00	83,09	12,28	0,43	4,2	100,00
Buol	71,63	23,54	2,13	2,70	100,00	80,24	13,85	4,74	1,18	100,00
Parigi Moutong	77,43	13,40	2,63	6,54	100,00	80,28	13,31	2,04	4,37	100,00
Tojo Una-Una	68,53	12,06	14,29	5,11	100,00	75,52	11,82	10,91	1,75	100,00
Sigi	70,03	16,51	9,83	3,64	100,00	80,86	14,26	3,99	0,90	100,00
Banggai Laut	62,55	4,90	19,27	13,28	100,00	62,07	4,99	24,98	7,96	100,00
Morowali Utara	78,08	10,33	6,37	5,23	100,00	85,37	7,01	4,97	2,65	100,00
Kota Palu	92,54	7,46	0,00	0,00	100,00	91,02	8,31	0,67	0,00	100,00
SULAWESI TENGAH	80,07	12,12	4,22	2,99	100,00	83,11	10,93	3,80	2,15	100,00

Persentase Penduduk yang menggunakan telepon khususnya di 3 Kabupaten Tertinggal yaitu Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan kabupaten Tojo Una-una dalam 2 Tahun Terakhir Dimana 3 Kabupaten Tertinggal semuanya mengalami kenaikan persentase di Tahun 2021 hal ini dapat di lihat pada tabel 2.9 di bawah ini

Tabel 2.8
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) Tahun 2020-2021

Kabupaten/Kota	Menggunakan Telepon Seluler tahun 2020		Menggunakan Telepon Seluler Tahun 2021		Total
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Banggai Kepulauan	63,17	36,83	65,94	34,06	100,00
Banggai	79,63	20,37	78,52	21,48	100,00
Morowali	81,56	18,44	84,04	15,95	100,00
Poso	84,79	15,21	87,33	12,67	100,00
Donggala	69,69	30,31	71,97	28,03	100,00
Tolitoli	76,82	23,18	75,56	24,44	100,00
Buol	69,55	30,45	71,11	28,89	100,00
Parigi Moutong	77,59	22,41	79,31	20,69	100,00
Tojo Una-Una	66,17	33,83	72,91	27,09	100,00
Sigi	68,78	31,22	74,81	25,19	100,00
Banggai Laut	57,48	42,52	65,37	34,63	100,00
Morowali Utara	81,82	18,18	81,77	18,23	100,00
Kota Palu	94,41	5,59	93,07	6,93	100,00
SULAWESI TENGAH	77,41	22,59	79,01	20,99	100,00

Sumber : BPS

Persentase rumah tangga menurut sumber air minum bersih khususnya di 3 kabupaten Tertinggal yaitu Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan kabupaten Tojo Una-una dimana 3 Kabupaten tertinggal yang terendah memperoleh sumber air minum bersih ada di Kabupaten Sigi dengan persentase 57,04 dan hal ini dapat di lihat pada Tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 2.9
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Bersih,
Dan Sumber Air Minum Layak Tahun 2021

Kabupaten/kota	Sumber Air minum bersih		Sumber Air Minum Layak	
	Tidak	Air Bersih	Tidak	Air Layak
Banggai Kepulauan	13,51	86,49	3,11	96,89
Banggai	20,33	79,77	4,82	95,18
Morowali	16,41	83,59	6,83	93,17
Poso	24,20	75,80	10,23	89,77
Donggala	30,88	69,12	10,58	89,42
Tolitoli	27,18	72,82	14,08	85,92
Buol	12,63	87,37	13,75	86,25
Parigi Moutong	35,17	64,83	23,85	76,15
Tojo Una-Una	12,52	87,48	5,72	94,28
Sigi	42,96	57,04	21,92	78,08
Banggai Laut	24,06	75,94	7,56	92,44
Morowali Utara	26,99	73,01	17,00	83,00
Kota Palu	3,94	96,06	1,77	98,23
SULAWESI TENGAH	23,19	76,81	11,49	88,51

Sumber : BPS

Persentase penduduk pengguna internet di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di 3 kabupaten Tertinggal yaitu Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan kabupaten Tojo Una-una Dimana Kabupaten Tojo-Una-una hanya mencapai 31,24% pada Tahun 2020 hal ini dapat di lihat pada tabel 2.11 di bawah ini.

Tabel 2.10
Persentase Penduduk Pengguna Internet

Kabupaten/kota	Menggunakan Internet Tahun 2020		Menggunakan Internet Tahun 2021		Total
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Banggai Kepulauan	30,69	69,31	39,61	60,39	100,00
Banggai	45,78	54,22	49,13	50,87	100,00
Morowali	39,05	60,95	55,63	44,37	100,00
Poso	43,93	56,07	48,99	51,01	100,00
Donggala	34,27	65,73	41,24	58,76	100,00
Tolitoli	42,28	57,72	46,48	53,52	100,00
Buol	34,85	65,15	45,25	54,75	100,00
Parigi Moutong	35,35	64,65	45,76	54,24	100,00
Tojo Una-Una	31,24	68,76	42,23	57,77	100,00
Sigi	35,02	64,98	44,79	55,21	100,00
Banggai Laut	30,07	69,93	40,21	59,79	100,00
Morowali Utara	41,93	58,07	50,44	49,59	100,00
Kota Palu	75,26	24,74	77,75	22,25	100,00
SULAWESI TENGAH	42,82	57,18	50,15	49,85	100,00

Sumber : BPS

2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan mutu modal manusia. Paradigma Pembangunan Mutu Modal Manusia, dianggap sebagai suatu konsep yang lebih komprehensif karena memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi, aspek pendidikan dan aspek kesehatan. Berdasarkan metode baru perhitungan IPM, aspek ekonomi meliputi pengeluaran riil perkapita; aspek pendidikan meliputi angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, sedangkan aspek kesehatan meliputi angka harapan hidup.

Pembangunan mutu modal manusia di Provinsi Sulawesi Tengah secara kontinu mengalami perbaikan yang cukup nyata, yang ditandai dengan meningkatnya nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada tahun 2021 nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 69,79 poin lebih tinggi jika dibandingkan pada Tahun 2020 sebesar 69,55 poin dan telah melebihi target RPJMD pada tahun 2021 sebesar 68,50-68,76 poin dan target RKPD Perubahan Tahun 2021 sebesar 69,70 poin. Sementara IPM yang dicapai Indonesia sebesar 72,29 poin, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: Sumber: BPS, Tahun 2022. Gambar 2.35 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017–2021 Perspektif pencapaian IPM kabupaten/kota Tahun 2021, capaian IPM tertinggi masih berada di Kota Palu dengan nilai IPM sebesar 81,70 poin, disusul Kabupaten Morowali sebesar 72,29 poin, sedangkan nilai IPM terendah di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 64,74 poin, Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 – 2021 Perspektif pencapaian IPM kabupaten/kota Tahun 2021, capaian IPM tertinggi masih berada di Kota Palu dengan nilai IPM sebesar 81,70 poin, disusul Kabupaten Morowali sebesar 72,29 poin, sedangkan nilai IPM terendah di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 64,74 poin, dapat dilihat pada tabel 2.12 dan 2.13 berikut.

Tabel 2.11



Sumber : BPS Tahun 2022

Tabel 2.12

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia
Banggai Kepulauan	65,61
Banggai Kepulauan	70,60
Morowali	72,29
Poso	71,45
Donggala	65,72
Tolitoli	66,30
Boul	68,25
Parigi Moutong	65,82
Tojo Una-una	64,74
Sigi	68,49
Banggai Laut	65,65
Morowali Utara	68,48
Palu	81,70
Sulawesi Tengah	69,79

Sumber : BPS Tahun 2022

A. Angka Harapan Hidup

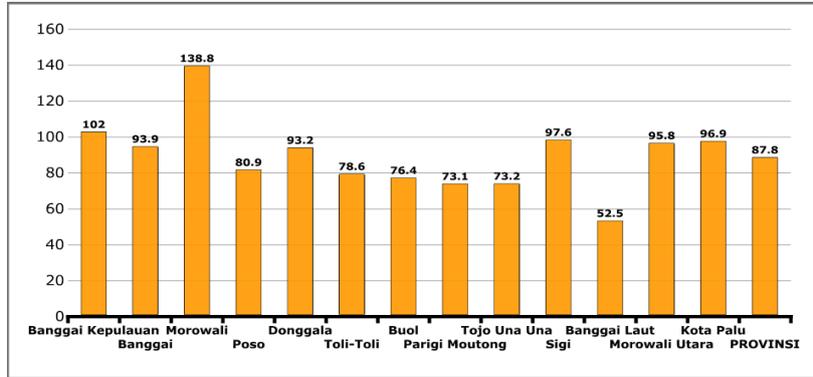
Angka Harapan Hidup (AHH) khususnya di 3 kabupaten Tertinggal yaitu Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan kabupaten Tojo Una-una Semuanya mengalami kenaikan di Tahun 2021 dimana Kabupaten Donggala pada Tahun 2020 ke Tahun 2021 naik 0,25% Persentase Angka Harapan Hidup dapat di lihat pada tabel 2.14 di bawah ini :

Tabel 2.13
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Tertinggal di Sulawesi Tengah

No	Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup		
		2020	2021	Progres
1	Sigi	69,99	70,09	0,14
2	Donggala	67,33	67,50	0,25
3	Tojo Una-una	65,67	65,90	0,35
Rata-rata		67,66	67,83	0,25

Sumber: BPS

Cakupan Imunisasi Dasar lengkap Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

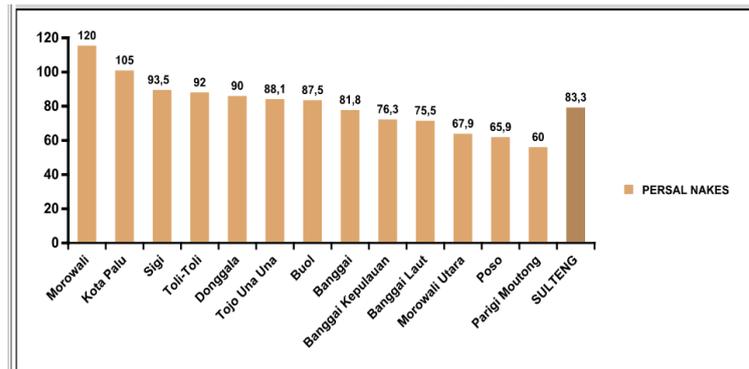


Sumber :Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Dinkes Sulteng Tahun 2021.

Penolong Kelahiran dengan Tenaga Medis

Persalinan ditolong Oleh Tenaga Kesehatan adalah Ibu bersalin yang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan yang Profesional (Dokter, Bidan dan Perawat). Cakupan Persalinan oleh Nakes dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Cakupan Persalinan Nakes Kabupaten Kota Tahun 2021



Sumber :Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Dinkes Sulteng Tahun 2021.

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2021 meningkat 83,3% dibandingkan Tahun 2020 yaitu 80,1% Faktor penyebab adalah :

- 1) keadaan Geografis yang sulit dan Sarana Prasarana yang belum memadai;
- 2) jangkauan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai, Pemilihan Penolong dan tempat persalinan masih dipengaruhi oleh sosial budaya Masyarakat penentu keputusan Suami atau Keluarga.

B. Angka Harapan Lama Sekolah

Tingkat partisipasi angka harapan lama sekolah khususnya di 3 kabupaten Tertinggal yaitu Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan kabupaten Tojo Una-una terjadi peningkatan rata-rata hanya sebesar 12.57 tahun pada tahun 2021. Peningkatan HLS yang terjadi di kabupaten tertinggal, hal tersebut bisa dilihat pada tabel 2.15 berikut

Tabel 2.14
Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Tertinggal Prrovinsi Sulawesi Tengah

No	Kabupaten	Harapan Lama Sekolah		
		2020	2021	Progres
1	Sigi	12,87	12,88	0,08
2	Donggala	12,49	12,51	0,16
3	Tojo Una-una	12,28	12,29	0,08

Sumber : Data BPS – Provinsi Sulawesi Tengah , diolah Kembali

C. Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah khususnya di 3 kabupaten Tertinggal yaitu Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan kabupaten Tojo Una-una hanya Kabupaten Donggala yang mengalami Penurunan di Tahun 2021 hal ini dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kabupaten	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		
		2020	2021	Progres

1	Sigi	8,56	8,82	3,04
2	Donggala	8,06	7,98	-0,99
3	Tojo Unauna	8,39	8,40	0,12
Rata-rata		8,34	8,40	0,72

Sumber: BPS

Capaian indikator kinerja bidang pendidikan terkait angka partisipasi sekolah, kelulusan dan melanjutkan sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2016-2020, terlihat pada Tabel 2.17 berikut.

Tabel
2.16

Capaian Indikator Kinerja Angka Partisipasi Sekolah, Kelulusan dan Melanjutkan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

No.	INDIKATOR KINERJA	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%) :					
	- APS SD/MI	98,00	98,14	98,13	98,32	98,27
	-APS SMP/MTs	92,08	92,49	92,71	93,01	92,74
	- APS SMA/MA/SMK	73,96	74,82	75,05	75,02	74,96
2.	Angka Putus Sekolah (%)					
	- APUS SD/MI	0,06	0,17	0,26	0,10	0,005
	-APUS SMP/MTs	0,11	0,39	0,80	0,14	0,03
	- APUS SMA/MA/SMK	0,16	0,71	1,22	0,28	0,04
3.	Angka Kelulusan (%)					
	- AL SD/MI	91,29	98,89	97,37	99,93	98,73
	-AL SMP/MTs	99,9	99,6	97,64	96,91	98,05
	- AL SMA/MA/SMK	99,81	99,02	98,66	99,01	98,90
4.	Angka Melanjutkan (%)					
	- AM SD/MI	100	100	100	100	100
	-AM SMP/MTs	100	100	100	100	100
	- AM SMA/MA/SMK	83,17	83,98	84,79	85,60	86,41

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2020, Dinas Dikbud Provinsi

Sulteng Tahun 2021 (Data diolah kembali).

D. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 Perkapita

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran makanan	420.182	480.98	474.81	505.60	516.839
Pengeluaran non	422.730	437.36	465.82	478.03	1.035.77
Total Pengeluaran Perkapita	842.912	918.35	940.63	983.64	1.552.61
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Makanan per	50,15	47,62	49,52	48,60	66,71

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2017-2021.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Sulawesi Tengah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 menunjukkan *trend* peningkatan, yakni dari Rp 842.912, perkapita perbulan pada Tahun 2016 meningkat menjadi Rp1.552.616,-perkapita perbulan pada Tahun 2020. Konsumai rumahtangga dari non pangan Tahun 2020 lebih dominan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

2.3 Arah Kebijakan dan Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 terdapat 62 (enam puluh dua) daerah tertinggal yang tersebar di 11 (sebelas) provinsi di 5 (lima) wilayah yakni Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatera.

Daerah tertinggal yang telah ditetapkan di Wilayah Sulawesi yaitu di Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tojo Una Una yang mana memiliki wilayah serta masyarakat yang kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain, hal ini ditandai dengan indikator IPM yang rendah (dengan indeks rata-rata 62,2-62,7 pada tahun 2021 dan angka kemiskinan yang tinggi (dengan rata-rata 23,5-24 pada tahun 2022).

Adapun arah kebijakan dan sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Tahun 2020-2026:

- a. Pengembangan perekonomian masyarakat melalui pelatihan pemasaran dan promosi secara digital, fasilitasi akses permodalan termasuk melalui *crowdfunding* dan *peer to peer lending*, membuka peluang pasar ekspor, serta kegiatan pendukung lainnya berkolaborasi bersama mitra;
- b. Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan guru serta meningkatkan pelayanan dengan dukungan teknologi di bidang terkait;
- c. Percepatan pembangunan sarana-prasarana/ infrastruktur wilayah untuk pemenuhan layanan dasar dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan konektivitas dan sistem logistik antarwilayah;
- d. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui pengembangan ekonomi digital serta pemanfaatan untuk mendukung pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya;

- e. Peningkatan ketangguhan dan kemandirian daerah tertentu melalui pengembangan sosial, ekonomi, dan kawasan sesuai karakteristik wilayah;
 - f. Pembinaan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2021 melalui peningkatan daya saing dan kerja sama dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan untuk mendukung kemajuan dan kemandirian daerah; dan
 - g. Penanganan dan pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui pencegahan dan pendekatan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar dan jaring pengaman sosial, peningkatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat, revitalisasi ekonomi perdesaan dan daerah tertinggal yang terintegrasi dalam program pemulihan ekonomi daerah dan nasional.
2. Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:
- a. PPM di daerah tertinggal 3 wilayah kabupaten Sigi , Tojo Una-una dan Donggala pada tahun 2021 turun menjadi 13,05 pada tahun 2026 ditargetkan menurun menjadi 9,27 ;
 - b. IPM di daerah tertinggal pada tahun 2021 sebesar 66,32 dan di targetkan naik menjadi 68,77 pada tahun 2026;
 - c. 3 Kabupaten yang masih tergolong daerah tertinggal saat ini ditargetkan terentaskan, sehingga seluruh Kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2024 tidak termasuk dalam penetapan wilayah tertinggal;
 - d. Terlaksananya pembinaan pada 3 (tiga) daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2024.

Tabel 2.18
Capaian dan Target Stranas / Strada PPDT Provinsi Sulawesi Tengah pada Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Persentase penduduk Miskin (PPM)

WILAYAH DAERAH TERTINGGAL	IPM					PPM				
	2020	2021	Target Stranas 2024	Target 2024 (RPJMD)	Target Strada 2026 (RPJMD)	2020	2021	Target Stranas 2024	Target 2024 (RPJMD)	Target Strada 2026 (RPJMD)
Donggala	65,56	65,72	69,03	68,22	69,59	17,39	16,73	17,19	12,65	9,91
Tojo Una -Una	64,59	64,74	68,06	67,2	68,55	16,39	16,6	11,93	12,37	7,99
Sigi	68,12	68,49	71,7	70,88	72,3	12,45	13,05	11,90	9,63	9,91
RATA-RATA DT	66,09	66,32	62,7-62,2	68,77	70,15	15,41	13,05	24-23,5	11,55	9,27
Sulawesi Tengah	69,55	69,79		70	70,39	13,06	12,18		12,92	7,9

2.4 Tahapan dan Kerangka Logis Pencapaian Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Upaya pengentasan daerah tertinggal dilaksanakan secara fokus, terencana, dan bertahap. Tahapan penanganan 62 (enam puluh dua) daerah tertinggal tahun 2020-2024 memperhatikan:

- a. kemampuan fiskal/keuangan daerah dan prioritas/fokus belanja yang diperkirakan masih dipengaruhi oleh kebijakan pemulihan dampak pandemi COVID-19;
- b. periode penahapan dilakukan dalam kurun waktu 2022-2026 (memperhatikan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap tahunnya);
- c. Daerah Tertinggal Potensi Entas sesuai dengan target RPJMN dan RPJMD dan daerah dengan indikator ketertinggalan tinggi.

BAB III
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL

3.1 Integrasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

STRADA-PPDT Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026. Berdasarkan potensi daerah, analisis permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis baik pada skala daerah, nasional dan global, maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mengacu pada RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2025 Tahap Keempat, Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur yang disusun atas dasar kondisi obyektif kekinian daerah, maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, ditetapkan dengan rumusan: “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Visi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD Periode 2021-2026 harus pula merefleksikan Visi yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2005-2025, yaitu “Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Aman dan Berkeadilan”. Provinsi Sulawesi Tengah dengan kondisi geografis wilayah daratan yang memiliki basis pada sumber daya alam dan wilayah perairan yang potensial sebagai keunggulan daerah, sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan daya saing daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Sebagai penjabaran Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Misi 1: Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui berbagai program aksi, yaitu membangun sistem pendidikan terpadu berbasis pendidikan kejuruan/vokasi, pesantren, melaksanakan kegiatan retrieval, yaitu menelusuri dan menyekolahkan kembali anak usia SLTA yang putus sekolah karena alasan ekonomi, serta meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui fasilitasi dan penyediaan pembiayaan kesehatan gratis bagi keluarga miskin dan rentan, mengembangkan Sistem Jaminan Gizi dan Tumbuh kembang Anak di

Perkotaan, Perdesaan dan Wilayah Terpencil untuk memastikan penurunan angka stunting dan penurunan angka kematian ibu dan Balita, mengefektifkan penanganan masyarakat terdampak Covid-19 secara menyeluruh dan melanjutkan pemantauan terhadap penyintas maupun masyarakat secara umum melalui pelayanan kesehatan preventif dan promotif guna memastikan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

2. Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan kepada masyarakat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional melalui inovasi berbasis Iptek, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui penegakan supremasi hukum sehingga seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang adil dan merata sebagai perwujudan azas kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) serta menjunjung tinggi penegakan Hukum. Program Utama yang hendak dijalankan adalah membangun aparatur sipil negara yang profesional, reformasi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas birokrasi yang bertransformasi dari Money Follow Function menjadi Money Follow Program, reformasi kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien, serta reformasi pelayanan publik yang berkualitas melalui digitalisasi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi secara optimal. Percepatan reformasi birokrasi guna meningkatkan penguatan kelembagaan pemerintah daerah, merupakan keniscayaan sehingga harus dilakukan melalui berbagai kebijakan terkait dengan 8 area perubahan dalam mendorong reformasi birokrasi tersebut, yang meliputi:
 - 1) Manajemen perubahan;
 - 2) Deregulasi kebijakan;
 - 3) Penataan organisasi;
 - 4) Penataan Tatalaksana;
 - 5) Penataan Sumber daya aparatur;
 - 6) Penguatan akuntabilitas;
 - 7) Penguatan pengawasan, dan;

- 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, sehingga mampu menggerakkan perekonomian guna meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya mengatasi kerentanan sosial yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak bencana alam dan sosial, sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Provinsi Sulawesi Tengah. Percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem juga menjadi fokus penanganan bidang sosial yang harus didukung didukung oleh penyediaan dana yang memadai termasuk dana desa.
 4. Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah. Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif, peningkatan aktivitas pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi wilayah di berbagai sektor ekonomi terutama usaha kecil menengah, membuka keterisolasian dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya daerah terpencil. Merevitalisasi berbagai sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, irigasi dan sanitasi sebagai daerah yang sewaktu-waktu terancam bencana alam. Percepatan pembangunan infrastruktur guna membuka akses transportasi darat antar daerah dalam provinsi dan antar provinsi, termasuk akses yang menghubungkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dengan wilayah-wilayah hinterland.
 5. Misi 5: Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan. Misi ini untuk mewujudkan terciptanya pemertaan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah, yaitu dengan menjalankan program redistribusi aset bagi pembangunan berkeadilan, Sinergitas Memanfaatkan Dana Desa dan Dana Kelurahan di kabupaten/kota bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan antar Kecamatan maupun antar Perdesaan, memperkuat kelembagaan ekonomi di perdesaan dan wilayah terpencil termasuk membangun rantai usaha antara Bumdes dengan BUMD dan swasta, serta mengembangkan potensi ekonomi perdesaan bagi pemerataan antar wilayah melalui

peningkatan produktivitas dan kapasitas SDM, dan penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya guna menurunkan angka pengangguran.

6. Misi 6: Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup sehingga tercipta suatu kehidupan harmonis dan bahagia, melalui peningkatan kualitas penyediaan air bersih, listrik, perumahan dan penataan lingkungan kumuh. Misi ini akan diwujudkan melalui program penataan ruang terintegrasi, penataan permukiman dan manajemen pengelolaan sampah, penyediaan ruang terbuka hijau, mitigasi perubahan iklim dan penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup, serta memastikan agar seluruh aktivitas kegiatan masyarakat ramah lingkungan, guna mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.
7. Misi 7: Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan optimalisasi pengelolaan sektor unggulan melalui peningkatan kerja sama pembangunan antar daerah dalam lingkup provinsi maupun dengan daerah di luar provinsi. Misi ini akan dijalankan melalui kerjasama antar daerah utamanya sekawasan Teluk Tolo baik kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, se Kawasan Laut Sulawesi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, sekawasan Teluk Tomini dan Perairan Halmahera Bagian Barat terdiri dari Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, menata hubungan antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Pusat yang lebih sinergis, serta meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelayanan publik dan peningkatan inovasi dan daya saing Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Misi 8: Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik terutama bidang pendidikan dan kesehatan serta pelayanan publik pada semua bidang kepada masyarakat melalui teknologi informasi dan pengembangan sistem terintegrasi dan digitalisasi, guna mewujudkan pelayanan prima, efisien dan efektif.

9. Misi 9: Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah. Misi ini merupakan perwujudan cita-cita untuk mencapai 100 tahun Sulawesi Tengah di Tahun 2064, melalui kajian pembentukan daerah otonomi baru. Guna mewujudkan misi ini, perlu mempertimbangkan berbagai regulasi dan kebijakan Pemerintah terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru, namun demikian upaya penyiapan perlu dilakukan melalui berbagai kajian kelayakan secara komprehensif.

Selanjutnya, selain RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026 memiliki keselarasan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, maka perlu pula memperhatikan direktif presiden sebagai arahan dalam upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian Sasaran Visi Indonesia 2045, sehingga terjadi keselarasan misi antara perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD dengan 5 Sasaran Visi Indonesia 2045. Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, dengan Pencapaian Sasaran Visi Indonesia 2045, diuraikan sebagai berikut:

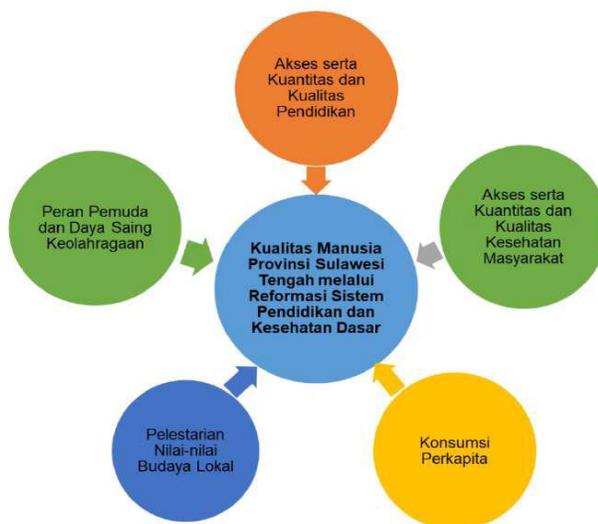
1. Misi 1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar. Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu: Pembangunan Sumber Daya Manusia.
2. Misi 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM. Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:
 - 1) Penyederhanaan Regulasi, dan
 - 2) Penyederhanaan Birokrasi.
3. Misi 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan. Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:
 - 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, dan
 - 2) Transformasi Ekonomi.
4. Misi 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah. Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:
 - 1) Pembangunan Infrastruktur, dan
 - 2) Transformasi Ekonomi.

5. Misi 5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan. Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:
 - 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Pembangunan Infrastruktur, dan;
 - 3) Transformasi Ekonomi.
6. Misi 6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan. Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:
 - 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Pembangunan Infrastruktur, dan;
 - 3) Transformasi Ekonomi.
7. Misi 7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga. Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:
 - 1) Pembangunan Infrastruktur;
 - 2) Penyederhanaan Regulasi, dan;
 - 3) Transformasi Ekonomi.
8. Misi 8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital. Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:
 - 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Pembangunan Infrastruktur;
 - 3) Penyederhanaan Regulasi, dan;
 - 4) Penyederhanaan Birokrasi.
9. Misi 9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah. Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:
 - 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Pembangunan Infrastruktur; dan
 - 3) Transformasi Ekonomi.

Satu dari beberapa faktor yang sangat menentukan tercapainya upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang memadai. Ketersediaan sarana pelayanan dasar untuk pelayanan pendidikan, kesehatan pengeluaran perkapita, indeks

pembangunan kebudayaan, dan indeks pembangunan pemuda menjadi prasyarat terwujudnya Misi I:

- a. Misi 1, yakni Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar, maka dirumuskan Perencanaan Terintegrasi dalam Langkah Pencapaian Misi 1 sebagai berikut :



Gambar 3.1 Misi 1

Reformasi birokrasi dilaksanakan oleh pemerintah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sekaligus mendorong pemerintahan berorientasi hasil (result-oriented government) sesuai kewenangannya. Alat ukur yang digunakan untuk menilai penerapan reformasi birokrasi adalah indeks reformasi birokrasi. Indeks ini menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Kondisi tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas dalam beberapa aspek diantaranya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah, inovasi daerah, profesionalitas ASN serta keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

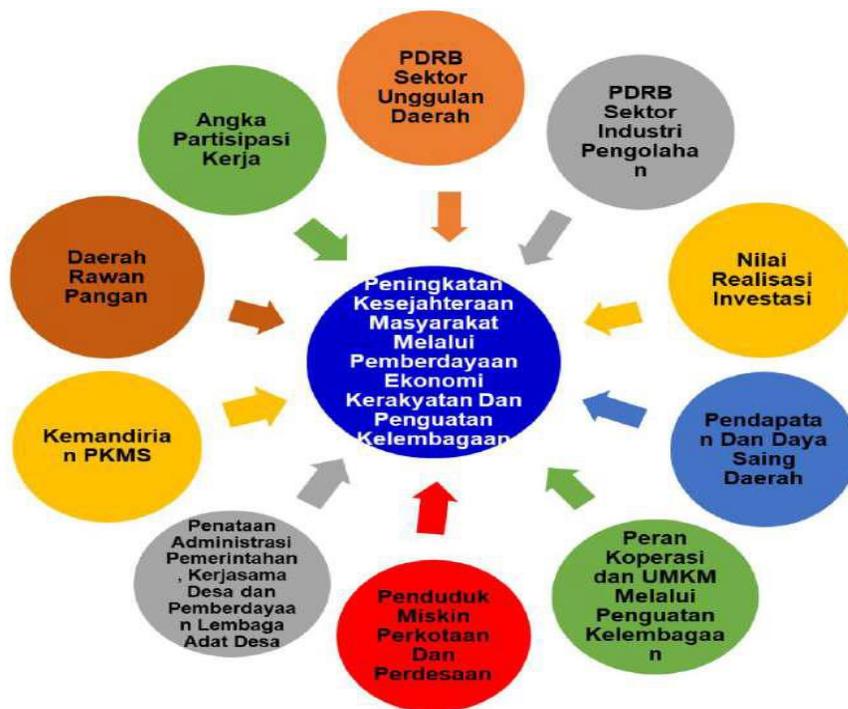
- b. Dalam reformasi birokrasi, sasaran strategis terwujudnya penegakan Supremasi hukum dan HAM diwujudkan melalui indeks kualitas kebijakan.

Oleh karena itu dalam upaya pencapaian misi 2, maka dirumuskan perencanaan terintegrasi sebagai berikut:



Gambar 3.2 Misi 2

- c. Terdapat tiga hal pokok yang akan dicapai pada misi 3. Pertama, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah dilakukan dengan pertumbuhan ekonomi. Kedua, menurunkan angka kemiskinan dengan menurunkan presentase penduduk miskin. Ketiga, dalam rangka menurunkan angka pengangguran, maka angka tingkat partisipasi angkatan kerja akan ditingkatkan yang berarti bahwa kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja meningkat. Perencanaan Terintegrasi untuk mencapai Misi 3 yaitu Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan disajikan pada gambar sebagai berikut :



Gambar 3.3 Misi 3

- d. Pembangunan infrastruktur daerah sebagai upaya untuk mewujudkan misi 4, dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan.

Selain itu, peningkatan pembangunan infrastruktur daerah juga tercermin dari keterpaduan konektivitas transportasi darat dan laut dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik serta integrasi pusat-pusat perekonomian. Dalam Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah sesuai misi 4 ini, maka dirumuskan perencanaan terintegrasi sebagai berikut:



Gambar 3.4 Misi 4

- e. Pembangunan yang berkualitas yang tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan pemerataan dilaksanakan untuk mewujudkan Misi 5 yakni Mewujudkan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah secara Merata dan Berkeadilan. Kondisi tersebut akan dilaksanakan dengan melalui pemerataan distribusi pendapatan yang tercermin dari menurunnya Indeks Gini dan inflasi. Pembangunan masyarakat yang berkeadilan juga dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender yang direpresentasikan oleh meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender. Perencanaan Terintegrasi untuk mencapai Misi 5 dirumuskan sebagai berikut



Gambar 3.5 Misi 5

- f. Dalam mewujudkan harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan sesuai misi 6 ini, perlu mewujudkan keseimbangan pembangunan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, serta menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup tersebut diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dapat dijadikan bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Misi 6 ini juga diwujudkan dengan peningkatan kapasitas atau kemampuan daerah untuk mengetahui kapasitas dan menentukan upaya-upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka menurunkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI).

- g. Dalam pencapaian Misi 7 yakni Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar



Gambar 3.6 Misi 7

Dalam pencapaian Misi 7 yakni Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga, maka dilakukan bentuk-bentuk kerjasama antar pemerintahan daerah dalam bidang-bidang yang disepakati untuk mencapai nilai efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Perencanaan Terintegrasi untuk mencapai Misi 7 disajikan sebagai berikut :



Gambar 3.7 Perencanaan Terintegrasi untuk mencapai Misi 7

- h. Dalam upaya Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital pada misi 8 ini, maka dirumuskan perencanaan terintegrasi untuk mencapai misi 8 sebagai berikut:



Gambar 3.8 Misi 8

- i. Dalam upaya untuk mewujudkan persiapan pembentukan daerah otonomi baru dilakukan dengan tersedianya kejian akademik persiapan DOB. Perencanaan Terintegrasi untuk mencapai Misi 9 yaitu Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah” disajikan pada gambar sebagai berikut :



Gambar 3.9 Misi 9

Percepatan pembangunan daerah tertinggal tahun 2022-2026 dilaksanakan secara terintegrasi, membangun sinergi dan sinkronisasi kebijakan serta program percepatan pembangunan daerah tertinggal secara nasional dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan pelaku usaha dan masyarakat. Integrasi percepatan pembangunan daerah tertinggal dapat dilakukan berbasis tematik pengembangan potensi wilayah atau dalam konteks pengentasan kriteria-indikator penyebab ketertinggalan daerah.

Secara umum daerah tertinggal memiliki potensi sumber daya alam terutama sektor pertanian, perikanan, kerajinan dan karya sebagai buah dari kearifan lokal serta potensi wisata.

Pengembangan potensi diarahkan berbasis kawasan secara terpadu dari penyiapan sektor hulu sampai pengembangan sektor hilir yang disesuaikan dengan karakter wilayah masing-masing.

Kunci pengentasan daerah tertinggal adalah penyelesaian terhadap kriteria penyebab ketertinggalan yang meliputi kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana-prasarana, aksesibilitas, kapasitas keuangan daerah, dan karakteristik daerah. Upaya pengentasan daerah tertinggal bersifat multidimensi, sehingga perlu dilalrukan dengan strategi kolaboratif yang melibatkan lintas sektor dan lintas pelaku, meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan pelaku usaha/mitra termasuk keterlibatan masyarakat di tingkat desa.

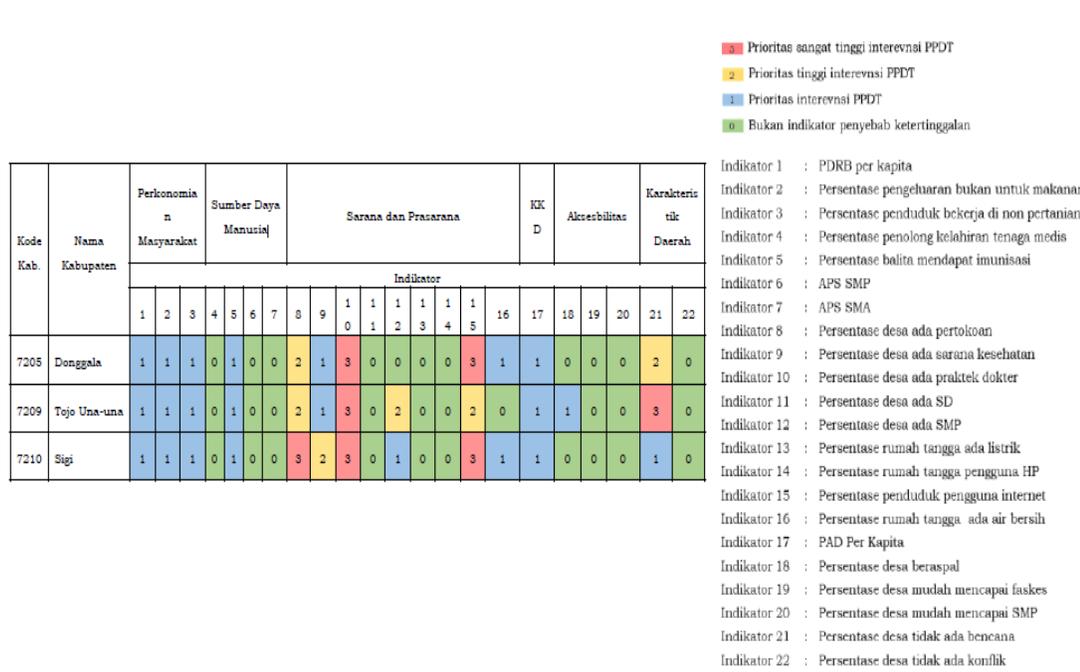
Berdasarkan analisis indikator ketertinggalan kabupaten di Indonesia, terdapat 3 (tiga) kabupaten di wilayah Sulawesi yang dikategorikan tertinggal yaitu 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Donggala, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Sigi). Semakin tinggi penyebab ketertinggalan pada suatu indikator maka semakin tinggi prioritas intervensi pada indikator tersebut.

Daerah Tertinggal di wilayah Sulawesi terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki rata-rata IPM sebesar 62,7 pada tahun 2021 dengan IPM terendah yaitu Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 64,52 (enam puluh empat koma lima dua) dan Kabupaten Donggala sebesar 65,49 (enam puluh lima koma empat sembilan). Nilai IPM wilayah Sulawesi masih di bawah IPM nasional sebesar 71,92 (tujuh puluh satu koma sembilan puluh dua) pada tahun 2021. Hal ini disebabkan antara lain rendahnya rasio jumlah dokter per 1.000 (seribu) penduduk dengan nilai rasio sebesar 0,12 [nol koma satu dua), jumlah sarana-prasarana kesehatan per 1.000 (seribu) penduduk dengan rasio sebesar 1,15 (satu koma satu lima), serta terbatasnya ketersediaan SD dan SMP per 1.000 (seribu) penduduk dengan rasio sebesar 1,56 (satu koma Lima enam).

Indikator makro lainnya yaitu PPM, 3 (tiga) daerah tertinggal di Sulawesi memiliki PPM sebesar 16,24% (enam belas koma dua empat persen) dengan PPM tertinggi yaitu Kabupaten Donggala sebesar 18,40% (delapan belas koma empat nol persen), Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 17,16% (tujuh belas koma satu enam persen), dan Kabupaten Sigi sebesar 12,91% (dua belas koma sembilan satu persen), sedangkan angka nasional PPM yaitu sebesar 9,41% (sembilan koma empat satu persen) pada tahun

2019. Adapun capaian dan target STRADA-PPDT Tahun 2022-2026 pada indikator IPM dan PPM

Prioritas Interventi Berdasarkan Indikator Ketertinggalan di Wilayah Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Gambar 3.10 dibawah ini :



Gambar 3.10 Indikator Ketertinggalan Wilayah Sulteng

3.2 Isu Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Sulawesi

a. Sarana-Prasarana

1. ketersediaan bahan bakar daerah tertinggal di wilayah Sulawesi yang belum merata;
2. masih kurangnya sarana-prasarana telekomunikasi dan informatika yang mendukung kegiatan ekonomi antara lain di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi;
3. daerah tertinggal di wilayah Sulawesi adalah daerah yang terdampak bencana, sehingga menyebabkan kerusakan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala;
4. masih rendahnya ketersediaan sarana-prasarana air bersih, sanitasi, dan permukiman daerah tertinggal di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala; dan
5. kurangnya sarana-prasarana pendukung pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata antara lain keterbatasan sarana prasarana ekonomi/pasar, jaringan internet, dan penyediaan akses listrik.

b. Perekonomian Masyarakat

1. belum optimalnya pengembangan pariwisata di daerah tertinggal hal ini disebabkan antara lain sarana-prasarana dan manajemen pariwisata yang terbatas;
2. belum optimalnya komoditi unggulan pengelolaan kawasan pertanian
3. masih rendahnya peran lokal lembaga pengembangan produk unggulan dalam
4. industri pengolahan sehingga pengelolaan potensi daerah tertinggal meliputi perikanan, pariwisata, dan pertanian belum dikelola dengan baik;
5. pengembangan dan pemasaran hasil produksi perikanan belum didukung oleh sistem rantai suplai yang memadai, di sisi lain posisi strategis Sulawesi Tengah sebagai penghubung Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia belum dioptimalkan; dan
6. masih tingginya angka kemiskinan terutama petani dan nelayan karena kapasitas yang terbatas dan tingkat pendapatan yang rendah.

c. Sumber Daya Manusia

1. tingginya angka stunting di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala;
2. rendahnya kualitas dan keterampilan tenaga kesehatan antara lain disebabkan belum optimalnya pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas kader posyandu/ bidan puskesmas / puskesmas pembantu serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan yang masih terbatas;
3. terdapat daerah yang memiliki keterbatasan layanan pendidikan karena rendahnya tenaga kependidikan dan sarana-prasarana pendidikan yang kurang memadai; dan
4. masih rendahnya kapasitas tenaga kerja dalam mendukung perekonomian masyarakat di wilayah Sulawesi.

d. Aksesibilitas

1. rendahnya aksesibilitas di wilayah Sulawesi akibat terbatasnya sarana-prasarana jalan dan jembatan serta

transportasi darat menuju kasarawasan sentra produksi, kawasan pariwisata serta kawasan strategis ekonomi lainnya;

2. belum optimalnya pengembangan transportasi laut/ Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) untuk mendukung konektivitas antarwilayah, di sisi lain, daerah tertinggal di wilayah Sulawesi dapat sebagai penghubung antara Kawasan Timur dan Kawasan Barat Indonesia; dan
3. masih terdapat daerah dengan akses yang rendah ke pelayanan kesehatan.

e. Karakteristik Daerah

- 1) tingginya potensi bencana di daerah tertinggal di wilayah Sulawesi yang belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya mitigasi dan adaptasi yang komprehensif termasuk dalam pemulihan daerah pascabencana;
- 2) belum optimalnya pengelolaan daerah sungai dan kawasan konservasi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan; dan
- 3) masih rendahnya akses pangan dan gizi masyarakat karena belum optimalnya pemanfaatan lahan dan sumber pangan lokal

f. Kemampuan Keuangan Daerah

1. semua daerah tertinggal di wilayah Sulawesi memiliki kapasitas keuangan daerah yang rendah, antara lain karena masih rendahnya kompetensi aparatur pemerintah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah;
2. belum terkonsolidasinya data dan sistem dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah; dan
3. belum optimalnya tata kelola keuangan daerah terkait administrasi pengelolaan aset desa dan pemanfaatan sistem elektronik bagi pelayanan publik.

3.3 Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Sulawesi

Pengembangan potensi daerah tertinggal di wilayah Sulawesi memperhatikan potensi yang dimiliki pada setiap kabupaten sehingga diharapkan dapat menghasilkan potensi unggulan wilayah. Dalam rangka mengembangkan sektor perkebunan, perikanan, dan produk pertanian lainnya yang merupakan sektor basis di seluruh

daerah tertinggal di wilayah Sulawesi maka diperlukan pengembangan potensi wilayah dari kriteria hulu dan hilir secara terintegrasi, antara lain melalui pengembangan agroindustri. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan diharapkan dapat mentransformasikan struktur ekonomi wilayah dari perkebunan, perikanan, dan produk pertanian lainnya ke industri dengan berbasis pada agroindustri. Hilirisasi dari pengolahan potensi unggulan berorientasi pada keterkaitan daerah tertinggal dengan daerah pusat pertumbuhan lainnya.

Adapun pusat pertumbuhan/kawasan strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan ekonomi di daerah tertinggal wilayah Sulawesi antara lain PKSN Tahuna, DPP Manado-Likupang, DPP Makassar-Selayar-Toraja, DPP Wakatobi, Wilayah Metropolitan Makassar, Wilayah Metropolitan Manado, KEK Bitung, dan KEK Palu. Selanjutnya orientasi pengembangan produk unggulan tersebut menuju gerai pemasaran wilayah yakni ke Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Nasional di Sulawesi. Hal ini didukung dengan peningkatan konektivitas antarwilayah dan antamegara melalui sistem transportasi darat, laut, dan udara, termasuk meningkatkan pemanfaatan tol laut.

Strategi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayah Sulawesi, sesuai dengan 6 (enam) kriteria ketertinggalan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Sarana-Prasarana

Strategi dalam mendukung kebijakan peningkatan sarana-prasarana di wilayah Sulawesi yaitu:

1. pendistribusian jenis BBM tertentu dan BBM khusus, pengembangan gardu induk, supervisi progres pembangunan penyalur BBM satu harga;
2. penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) antara lain melalui sarana pengembangan kawasan/BTS/ Lastmile di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi;
3. peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala;
4. peningkatan ketahanan sumber daya air melalui pengembangan jaringan air tanah dan air baku, serta pengembangan jaringan irigasi permukaan, rawa, dan non-padi;

5. peningkatan kinerja penyediaan dan pengelolaan air bersih, sanitasi, dan peningkatan rumah layak huni, permukiman dan transmigrasi antara lain melalui penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang layak;
 6. pengembangan transmisi dan gardu induk serta penyediaan tenaga listrik; dan
 7. penyediaan sarana-prasarana untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata antara lain melalui peningkatan kemampuan pengelolaan pasar rakyat serta pelatihan dan pengembangan kapasitas pelaku usaha.
- b. Peningkatan Perekonomian Masyarakat
- Strategi untuk mendukung kebijakan dalam peningkatan perekonomian masyarakat daerah tertinggal di wilayah Sulawesi antara lain sebagai berikut:
1. pengembangan desa wisata di daerah tertinggal;
 2. pengembangan kawasan pertanian untuk mendukung komoditi unggulan kelapa melalui peningkatan ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas berupa bantuan saprodi (sarana produksi), dan penerapan literasi digital;
 3. pengembangan BUM Desa untuk memenuhi kebutuhan desa dan KUKM untuk mendukung pengembangan produk unggulan berbasis pengembangan industri pengolahan pertanian dan perikanan;
 4. pengembangan produk unggulan daerah melalui penyediaan alat pascapanen produk unggulan di wilayah 3T dan perbatasan;
 5. pengembangan kewirausahaan, UMKM dan koperasi antara lain melalui fasilitasi sistem digitalisasi pada koperasi, serta pelatihan kepada pengurus atau pengelola koperasi;
 6. pendidikan, pelatihan vokasi, dan penyuluhan yang didukung penerapan Smart Fanning 4.0 (penciptaan ekosistem) dan peningkatan nilai tambah prukades serta riset dan inovasi teknologi;
 7. peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri berupa fasilitasi dan pembinaan UMKM;
 8. perlindungan sosial melalui penyelenggaraan program sembako;

9. pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan melalui pembangunan/revitalisasi pasar rakyat;
10. penyediaan sarana-prasarana pengolahan dan pemasaran di sektor
KP untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri;
11. peningkatan pemasaran hasil kelautan dan perikanan antara lain pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner; dan
12. pengelolaan sumber daya perikanan antara lain melalui perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut dan penyediaan bantuan sarana-prasarana perikanan baik tangkap maupun budi daya.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal wilayah Sulawesi dapat dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. konvergensi pencegahan stunting di desa didukung oleh peningkatan usaha kesehatan berbasis masyarakat antara lain di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala;
2. peningkatan kapasitas sumber daya manusia tenaga kesehatan melalui pembinaan gizi masyarakat, fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat;
3. pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional melalui pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan;
4. pemerataan layanan pendidikan masyarakat yang berkualitas melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, penyediaan data dan statistik serta pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi untuk pendidikan dan kebudayaan;
5. peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga melalui antara lain orientasi peningkatan kesehatan kerja bagi masyarakat, fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah/provinsi yang difasilitasi dan dibina terkait penguatan pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) serta penyediaan sarana-prasarana/ penyediaan pos UKK kit;

7. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan sarana kesehatan; dan
8. peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal melalui pengembangan standardisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja binalattas melalui pelatihan bidang industri/PBK.

d. Peningkatan Aksesibilitas

Peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal di wilayah Sulawesi dapat dilakukan melalui:

1. pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional antara lain preservasi jalan Ampana - Balingara - Bunta - Pagimana, preservasi jalan Ampana - Balingara - Bunta - Pagimana MYC, preservasi jalan Tagolu - Malei - Uekuli - Marowo - Ampana MYC, preservasi jalan Tagolu - Malei - Uekuli - Marowo - Ampana, preservasi jalan Malala- Ogotua - Ogoamas -Tonggolobibi, preservasi jalan Tompe - Pantoloan - Surumana, preservasi jalan Tonggolobibi - Sabang - Tambu - Tompe melalui preservasi pemeliharaan rutin jalan, penanganan drainase, trotoar, dan fasilitas keselamatan jalan, serta preservasi jembatan;
2. peningkatan aksesibilitas infrastruktur konektivitas transportasi darat melalui prasarana bidang konektivitas darat; dan
3. pembangunan aksesibilitas melalui transportasi laut/ASDP untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah antara lain melalui pengadaan Emergency Assistance for Rehabilitation And Reconstruction (EARR) Port of Pantoloan Donggala Wani.

e. Penanganan Karakteristik Daerah

Percepatan pembangunan daerah tertinggal juga memperhatikan karakteristik masing-masing daerah, oleh karena itu diperlukan strategi untuk mengembangkan daerah-daerah tertinggal di wilayah Sulawesi, antara lain:

1. mitigasi dan rehabilitasi daerah rawan bencana antara lain melalui budaya sadar bencana, inventarisasi, verifikasi, dan pendampingan analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai; dan

2. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan antara lain melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pembangunan rendah karbon, dan pemulihan lahan akses terbuka.

f. Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah

Strategi untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah di wilayah Sulawesi yaitu :

1. meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah melalui bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan aset desa, pelatihan aparat pemerintah desa dan pengurus kelembagaan masyarakat desa;
2. peningkatan sumber-sumber pendapatan antara lain melalui fasilitasi peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah, fasilitasi penerapan belanja APBD yang berorientasi pada SPM pelayanan dasar;
3. perbaikan tata kelola keuangan daerah antara lain melalui penguatan kelembagaan pemerintah desa, penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik yang mendukung iklim investasi terutama di wilayah

3T) pemberian layanan pencatatan sipil di wilayah 3T (fasilitasi penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di wilayah 3T).

Strategi yang akan ditempuh dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026 berdasarkan Misi adalah sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui berbagai program aksi, yaitu membangun sistem pendidikan terpadu berbasis Pendidikan kejuruan/vokasi, mengembangkan jaminan gizi dan tumbuh kembang anak di perkotaan, perdesaan dan wilayah terpencil untuk memastikan penurunan angka stunting dan penurunan angka kematian ibu dan balita, mengefektifkan penanganan masyarakat terdampak covid-19 terdampak secara menyeluruh dan melanjutkan pemantauan terhadap penyintas maupun masyarakat secara umum melalui pelayanan kesehatan preventif dan promotif guna memastikan peningkatan derajat Kesehatan masyarakat.

Adapun strategi yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai Misi 1, adalah:

1. Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan menengah umum, kejuruan, Vokasi dan pendidikan khusus;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
4. Meningkatkan status gizi masyarakat dan jaminan kesehatan ibu hamil dan balita;
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM);
6. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
7. Meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata;
8. Meningkatkan nilai produksi olahan;
9. Meningkatkan pelestarian nilai budaya lokal;
10. Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga;
11. Meningkatkan pembinaan organisasi dan SDM Kepramukaan.

Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan kepada masyarakat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang professional melalui inovasi berbasis iptek, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien,

efektif, dan akuntabel. Adapun strategi yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai Misi 2, adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja administrasi pemerintah;
2. Menerapkan manajemen talenta dan manajemen kinerja aparatur;
3. Menerapkan pola karir ASN;
4. Memberikan reward and punishment terhadap ASN;
5. Melaksanakan penyusunan produk hukum dan penyelesaian masalah non-litigasi dan HAM.

Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang rentan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, sehingga mampu menggerakkan perekonomian guna meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Adapun strategi yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang ingin

dicapai Misi 3, adalah:

1. Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan daerah;
2. Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan;
3. Meningkatkan Nilai realisasi investasi;
4. Meningkatkan PAD terhadap total pendapatan;
5. Meningkatkan Daya Saing Daerah;
6. Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja dan perencanaan tenaga kerja;
7. Meningkatkan produktivitas dan kapasitas tenaga kerja berbasis digital dan teknologi informasi;
8. Meningkatkan kinerja pembangunan desa;
9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pemberdayaan;
10. Meningkatkan ketersediaan pangan;
11. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif, peningkatan aktivitas pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi wilayah diberbagai sektor ekonomi terutama usaha kecil menengah, membuka terisolasi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya daerah terpencil. Guna mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme pembiayaan hibah, APBN, APBD, Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) obligasi daerah, dan pinjaman pemerintah daerah kepada lembaga donor internasional maupun pinjaman daerah kepada BUMN/BUMD/Swasta.

Adapun strategi yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang ingin

dicapai Misi 4, adalah:

1. Meningkatkan penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas;
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perumahan dan keciptakaryaan;
3. Meningkatkan penyediaan jaringan listrik bagi masyarakat;
4. Meningkatkan penyediaan jaringan irigasi yang berkualitas;
5. Meningkatkan penyediaan perlengkapan transportasi darat dan laut;
6. Meningkatkan koordinasi perizinan angkutan Laut dan pembangunan pelabuhan regional.

Misi 5 : Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan terciptanya pemerataan pembangunan yang berkeadilan diseluruh wilayah, yaitu dengan menjalankan program redistribusi asset bagi pembangunan berkeadilan, sinergitas memanfaatkan dana desa dan dana kelurahan di kabupaten/kota bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan antar kecamatan maupun antar perdesaan, memperkuat kelembagaan ekonomi di perdesaan dan wilayah terpencil termasuk membangun rantai usaha antar bumdes dan BUMD dan swasta, serta mengembangkan potensi ekonomi perdesaan bagi pemerataan antar wilayah melalui peningkatan produktivitas dan kapasitas SDM, dan penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya guna menurunkan angka pengangguran.

Adapun strategi yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang ingin

dicapai Misi 5, adalah:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi;
3. Memperkuat peran perempuan dalam kesetaraan gender.

Misi 6: Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup sehingga tercipta suatu kehidupan harmonis dan bahagia, melalui peningkatan kualitas penyediaan air bersih, listrik, perumahan dan penataan lingkungan kumuh.

Misi ini akan diwujudkan melalui program penataan ruang terintegrasi penataan permukiman dan manajemen pengelolaan sampah penyediaan ruang terbuka hijau lintas kabupaten/kota, mitigasi perubahan iklim dan penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup, serta memastikan agar seluruh aktivitas kegiatan masyarakat ramah lingkungan.

Adapun strategi yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai Misi 6, adalah:

1. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
2. Meningkatkan pengelolaan hutan yang berkualitas;
3. Mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana;
4. Mewujudkan pencegahan dan penanggulangan bencana.

Misi 7: Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan melalui peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah dalam lingkup provinsi maupun dengan daerah diluar provinsi. Misi ini dijalankan melalui kerjasama antar daerah utama sekawasan Teluk Tolo terdiri dari kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara; sekawasan laut Sulawesi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan; sekawasan Teluk Tomini dan perairan Halmahera bagian Barat terdiri dari provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. Kerjasama ini diharapkan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sekitarnya yang lebih sinergis.

Adapun strategi yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai Misi 7, adalah:

Meningkatkan kerja sama pembangunan antar daerah.

Misi 8: Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik terutama bidang pendidikan dan kesehatan dan pelayan public pada semua bidang kepada masyarakat melalui pengembangan system terintegrasi dan digitalisasi, guna mewujudkan pelayanan prima, efisien dan efektif.

Adapun strategi yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai Misi 8, adalah:

Meningkatkan standar pelayanan publik.

Misi 9: Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sector unggulan daerah.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita 100 tahun Sulawesi Tengah di tahun 2064 dengan mendorong otonomi baru melalui kajian pembentukan daerah otonomi baru.

PROGRAM-KEGIATAN STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Program-kegiatan strategis percepatan pembangunan daerah tertinggal meliputi program-kegiatan strategis kementerian/lembaga sebagai kebijakan nasional untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta indikasi kebutuhan strategis percepatan pembangunan daerah tertinggal yang memperhatikan karakteristik, potensi dan permasalahan serta prioritas pembangunan di daerah tertinggal.

Tabel 3.1
Program-Kegiatan Strategis Kementerian/ Lembaga Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024

No.	Program-Kegiatan Kementerian/Lembaga	Uraian Program-Kegiatan Kementerian/Lembaga
1.	Kementerian Dalam Negeri	
	Bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan aset desa	Bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan aset desa
	Fasilitasi penerapan belanja APBD yang berorientasi pada SPM pelayanan dasar	Fasilitasi penerapan belanja APBD yang berorientasi pada SPM pelayanan dasar
	Fasilitasi peningkatan pajak Daerah dan retribusi Daerah	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi
	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Linakun Reaional	Pelatihan aparat pemerintah desa dan pengurus kelembagaan masyarakat desa
	Pemberian bantuan sarana-prasarana pemerintahan di	Pemberian bantuan sarana-prasarana pemerintahan di

No.	Program-Kegiatan Kementerian/Lembaga	Uraian Program-Kegiatan Kementerian/Lembaga
	perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar	perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar
	Pemberian layanan pencatatan sipil di wilayah 3T (fasilitasi penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan/GISA di wilayah 3T)	Pemberian layanan pencatatan sipil di wilayah 3T (fasilitasi penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan/GISA di wilayah 3T)
	Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik yang mendukung iklim investasi terutama di wilayah 3T	Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik yang mendukung iklim investasi terutama di wilayah 3T
	Penguatan kelembagaan pemerintah desa (peningkatan kompetensi pemerintah dan pengurus kelembagaan desa)	Penguatan kelembagaan pemerintah desa
2	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	
	Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di daerah tertinggal	Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di daerah tertinggal
	BUM Desa yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan desa jalan desa strategis	BUM Desa yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan desa
	Fasilitasi Pembangunan Peningkatan jalan desa strategis	Fasilitasi pembangunan peningkatan jalan desa strategis
	Pembangunan embung dan bangunan air lainnya di daerah tertinggal dan rawan pangan	Pembangunan embung dan bangunan air lainnya di daerah tertinggal dan rawan pangan
	Pengembangan desa wisata di daerah tertinggal Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan dan daerah tertinggal	Pengembangan desa wisata di daerah tertinggal
		Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan dan daerah tertinggal
	Pembangunan embung dan bangunan air lainnya di daerah tertinggal Perbatasan Smart Farming 4.0 (Penciptaan ekosistem) dan duta petani muda	Pembangunan embung dan bangunan air lainnya di daerah tertinggal perbatasan
	Bantuan pengolahan pasca panen produk unggulan daerah perbatasan	Smart Farming 4.0 (Penciptaan ekosistem) dan duta petani muda
		Bantuan pengolahan pascapanen produk unggulan daerah perbatasan
3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus	Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus
	Penyediaan Tenaga Listrik	Penyediaan Tenaga Listrik
	Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM Satu Harga
	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Alat Penyimpan Daya Listrik (APDAL)

No.	Program-Kegiatan Kementerian/Lembaga	Uraian Program-Kegiatan Kementerian/Lembaga
	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan Program kualitas lingkungan hidup Program nilai tambah dan daya saing industry Program pendidikan dan pelatihan Vokasi Program pengelolaan perikanan dan Kelautan	Pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil Perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut Pemasaran hasil kelautan dan perikanan Peningkatan nilai tambah dan daya saing industri (sarana-prasarana pengolahan dan pemasaran di sektor KP) Pendidikan dan pelatihan vokasi (penyuluhan kepada masyarakat) Logistik hasil kelautan dan perikanan Pemasaran hasil kelautan dan perikanan Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan Pengelolaan perbenihan ikan Pengembangan perikanan tangkap dan budi daya Pengembangan SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu)
5	Kementerian Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan masyarakat Pelayanan kesehatan dan JKN Pembinaan kesehatan masyarakat Pembinaan pelayanan Kesehatan	Pelayanan publik kepada masyarakat (penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu) Pelatihan bidang pendidikan tentang pertumbuhan bayi dan anak serta pembinaan gizi masyarakat Pembinaan gizi masyarakat Sarana bidang kesehatan fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat Pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan Pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga Pelayanan kesehatan bergerak
6	Kementerian Ketenagakerjaan Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan

No.	Program-Kegiatan Kementerian/Lembaga	Uraian Program-Kegiatan Kementerian/Lembaga
	Pendidikan dan pelatihan vokasi	Pengembangan standardisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja binalattas
	Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal
7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	
	Pembinaan dan penerapan smart city	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah/ Masterplan Smart City
	Pengelolaan konten dan diseminasi informasi public	Komunikasi publik/ diseminasi informasi melalui media kominfo (GPR TV)
		Komunikasi publik/diseminasi informasi mengenai stuniina
		Komunikasi publik/ diseminasi informasi melalui media kominfo (GPR TV, Komik Komunika)
	Pengembangan literasi digital bagi Masyarakat	Fasilitasi dan pembinaan masyarakat/literasi digital
	Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi	Sarana pengembangan kawasan/ akses internet
		Sarana Pengembangan Kawasan /BTS/Lastmile
8	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	Pendampingan, pengawasan, penyuluhan dan peningkatan sumber daya manusia koperasi	QDD/kelompok masyarakat untuk membentuk koperasi
	Pengembangan bisnis UKM jasa	QDG/UKM yang difasilitasi peningkatan manajemen dan mutu di sektor jasa
	Pengembangan manajemen koperasi	QDF/Koperasi yang difasilitasi sistem Digitalisasi
	Penguatan kapasitas usaha	BDG/usaha mikro yang difasilitasi perluasan jangkauan pemasaran melalui e-commerce/ online
	Peningkatan kualitas sumber daya Manusia yang diberikan pelatihan	DAA/UKM yang ditingkatkan Kompetensinya melalui penguatan Kapasitas yang terstandar
		SCFI Pengurus atau pengelola koperasi yang diberikan pelatihan
9	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Pemulihan kualitas lingkungan	Lahan bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan
		Lahan gambut yang direstorasi pada 7 provinsi
	Program ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pencegahan kebakaran hutan dan lahan
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pengembangan perbenihan tanaman Hutan
		Peningkatan kapasitas kelompok usaha perhutanan social
		Peningkatan penyuluhan

No.	Program-Kegiatan Kementerian/Lembaga	Uraian Program-Kegiatan Kementerian/Lembaga
		Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan
		Pemanfaatan jasa lingkungan kawasan Konservasi
		Pengelolaan kawasan konservasi
10	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kreatif/Badan Pariwisata dan
	Gerakan Sadar Wisata	SOM pariwisata yang difasilitasi pelatihan dan pembinaan masyarakat
	Pelatihan bidang pariwisata	SOM pariwisata yang difasilitasi pelatihan dan pembinaan masyarakat
	Sertifikasi kompetensi SOM pariwisata	SOM pariwisata yang tersertifikasi
11	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
	Layanan pembiayaan pendidikan tinggi	Bantuan pendidikan tinggi
	Pembangunan/rehabilitasi sarana-prasarana Pendidikan	Pembangunan/ rehabilitasi sarana-prasarana pendidikan
	Program PAUD Wajar 12 tahun	PAUD Wajar 12 tahun
12	Kementerian Perdagangan	
	Pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik Perdagangan	Fasilitasi dan pembinaan lembaga
		Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat
	Peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Fasilitasi dan pembinaan UMKM
13	Kementerian Perhubungan	
	Infrastruktur konektivitas transportasi darat	Pembangunan / rehabilitasi/pengembangan fasilitas transportasi darat
	Infrastruktur konektivitas transportasi laut	Prasarana bidang konektivitas laut
	Penyediaan dan pengembangan moda transportasi	Moda transportasi laut
	Subsidi transportasi	Subsidi angkutan perintis transportasi udara
	Infrastruktur konektivitas transportasi Udara	Pelayanan transportasi udara
		Prasarana bidang konektivitas udara
14	Kementerian Perindustrian	
	Fasilitasi dan pembinaan industri	Fasilitasi dan pembinaan industri
15	Kementerian Pertanian	
	Ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas	Ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas
	Nilai tambah dan daya saing industri pertanian	Nilai tambah dan daya saing industri pertanian
	Pendidikan, pelatihan vokasi dan Penyuluhan	Pendidikan, pelatihan vokasi dan penyuluhan
	Riset dan inovasi IPTEK	Riset dan inovasi IPTEK
16	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penunahan Rakyat	
	Program infrastruktur konektivitas	Jalan Trans pada 18 (delapan belas) pulau tertinggal, terluar, dan terdep (Major Project

No.	Program-Kegiatan Kementerian/Lembaga	Uraian Program-Kegiatan Kementerian/Lembaga
		Pembangunan Jembatan Trans pada 18 (delapan belas) pulau tertinggal, terluar dan terdepan (Major Project)
		Pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional
	Program Ketahanan Sumber Daya Air	Pengembangan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya
		Pengembangan jaringan air tanah dan air baku
		Pengembangan jaringan irigasi pennukaan, rawa, dan non-padi [hanya irigasi primer)
		Pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan bangunan rumah khusus
		Bantuan stirnulan perumahan swadaya
		Pembangunan dan rehabilitasi prasarana Pendidikan
		Penyelenggaraan permukiman dan bangunan gedung
		Penyelenggaraan air minum yang layak
		Penyelenggaraan sanitasi yang layak
17	Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)	
	Pengembangan Sistem Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan pemerintah desa/desa berinovasi
		Fasilitas dan pembinaan pemerintah desa/desa inovasi berketahanan sosial
18	Kementerian Sosial	
	Penyelenggaraan Program Sembako	Bantuan keluarga (keluarga yang memperoleh bantuan sosial pangan sembako)
19	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)	
	Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana - Pembinaan Potensi SAR	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat/Pelatihan teknis potensi SAR
20	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	
	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB di wilayah khusus
21	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	
	Bantuan peralatan kebencanaan	Bantuan peralatan untuk penanganan bencana yang efektif
	Budaya Sadar Bencana	Penyelenggaraan kegiatan mewujudkan masvarakat sadar bencana

No.	Program-Kegiatan Kementerian/Lembaga	Uraian Program-Kegiatan Kementerian/Lembaga
	Inventarisasi, verifikasi, dan pendampingan analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Pemulihan sarana-prasarana sosial, ekonomi, dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pasca bencana
	Penanganan bencana melalui program tanggap darurat jika terjadi bencana di Daerah Tertinggal	Penanganan bencana melalui program tanggap darurat jika terjadi bencana di daerah tertinggal
	Pengadaan sarana-prasarana jaringan komunikasi Pusdalops	Penyelenggaraan layanan bidang data, informasi dan komunikasi penanggulangan bencana
22	Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)	
	Akses Pos Lintas Batas Negara	Akses Pos Lintas Batas Negara
	Pembangunan Jalan Perbatasan	Pembangunan Jalan Perbatasan

Tabel 3.2
APBN 2021-2024

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
Donggala	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di wilayah 3T dan perbatasan (jagung)	4	Lokasi	Kec. Sindue Tombusabora, Kec. Sindue Tobata, Kec. Sindue, dan Kec Labuan	2021 - 2024	Kementerian Perindustrian
			Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di wilayah 3T dan perbatasan (kelapa sawit)	3	Kegiatan	Kec. Sojol, Kec. Balaesang, Kec. Sindue Tobata, dan Kec. Banawa Selatan	2021 - 2024	Kementerian Perindustrian
			Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di wilayah 3T dan perbatasan (padi)	5	Kegiatan	Kec. Sojol, Kec. Dampelas, Kec. Sojol Utara, dan Kec. Sirenja	2021 - 2024	Kementerian Perindustrian

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
	Ketersediaan Akses dan konsumsi Pangan Berkualitas	Ketersediaan Akses dan konsumsi Pangan Berkualitas	Pembangunan kawasan kakao	5	Kegiatan	Kec. Sojol, Kec. Dampelas, Kec. Sindue Tobata, Kec. Balaesang, dan Kec. Rio Pakava	2021	Kementerian Pertanian
			Pengadaan perajang bawang	5	Kegiatan	Kec. Labuan, Kec. Tanantovea, Kec. Sojol, dan Kec. Sindue	2021	Kementerian Pertanian
			Pengembangan kawasan kelapa	5	Lokasi	Kec. Dampelas, Kec. Balaesang, Kec. Sojol, dan Kec. Sindue	2021	Kementerian Pertanian
			Penggemukan Sapi	5	Kegiatan	Kec. Dampelas, Kec. Sirenja, Kec. Balaesang,	2021	Kementerian Pertanian

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
						dan Kec. Labuan		
			Pengelolaan Cokelat	5	Kegiatan	Kec. Sojol, Kec. Dampelas, Kec. Sindue Tobata, dan Kec. Balaesang	2021	Kementerian Pertanian
			Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pertanian (padi, perikanan, kelapa sawit, iazung)	4	Lokasi	Kec. Sojol, Kec. Dampelas, dan Kec. Banawa	2021	Kementerian Pertanian
			Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi padi, cabai, bawang merah, bawang putih, kelapa, kakao, cengkih, sapi potong	1	Lokasi	Kec. Labuan, Kec. Tanantovea, Kec. Sindue, dan Kec. Sindue Tobata	2021	Kementerian Pertanian

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
			Peremajaan tanaman kakao	300	Ha	Kec. Sindue Tombusabora, Kec. Sojol, Kec. Dampelas, Kec. Sindue Tobata, dan Kec. Balaesang	2021	Kementerian Pertanian
	Pengembangan desa wisata di daerah tertinggal	Pengembangan desa wisata di daerah tertinggal	Festival desa wisata (Festival (Peragaan, pameran, uorkshop, seminar dan lomba))	5	Paket	Kec. Banawa Selatan, Kec. Sojol, dan Kec Dampelas	2021 - 2024	kementerian Desa PDT
	Pengembangan Literasi Digital bagi masyarakat	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat/ Literasi Digita	Literasi digital pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	100	Kegiatan	kab. Donggala	2021 - 2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika
	Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Fasilitasi dan pembinaan UMKM	Literasi digital pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinssal (UMKM)	1	Kabupaten	kab. Donggala	2021	Kementrian Perdagangan

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
	Penyelenggaraan Program Sembako	Bantuan keluarga (keluarga yang memperoleh bantuan sosial pangan sembako)	Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	11.793	KPM	kab. Donggala	2020-2024	Kementerian Sosial
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budi Daya	Bantuan Alat Penangkapan Ikan	1	Kabupaten	kab. Donggala	2021-2024	Kementerian Kelautan Dan Perikanan
	Riset dan Inovasi IPTEK	Riset dan Inovasi IPTEK	Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	5	Kegiatan	kab. Donggala	2021	Kementerian Pertanian
	Smart Farming 4.0 (Penciptaan ekosistem) dan duta petani muda	Smart Farming 4.0 (Penciptaan ekosistem) dan duta petani muda	Fasilitasi Smart Farming dalam rangka peningkatan produktivitas komoditi unggulan dan implementasi pertanian presisi di daerah tertinggal (Drone sprayer, drone	5	Kegiatan	kab. Donggala	2021-2024	Kementerian Desa PDTT

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
			surveillance, soil and weather sensor early warning system dan lainnya)					
	Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di daerah tertinggal	Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di daerah tertinggal	Pascapanen tanaman kelapa	2	Unit	Kec. Dampelas, Kec. Balaesang, Kec. Sojol, dan Kec. Sindue	2020-2024	Kementerian PDPT
			Pengadaan perajang bawang	5	Kegiatan	Kec. Labuan, Kec. Tanantovea, Kec. Sojol, dan Kec. Sindue	2020-2024	Kementerian PDPT

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
			Pengolahan coklat	5	Kegiatan	Kec. Sojol, Kec. Dampelas, Kec. Sindue Tobata, dan Kec. Balaesang	2020-2024	Kementerian PDTT
			Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pertanian (padi, perikanan, kelapa sawit, jagung)	4	Lokasi	Kec. Sojol, Kec. Dampelas, dan Kec. Banawa	2020-2024	Kementerian PDTT
	Sumber Daya Manusia							
	Kesehatan Masyarakat	Pelatihan Bidang Pendidikan tentang pertumbuhan bayi dan anak serta pembinaan gizi masyarakat	Penanganan sfitnting	1	Kabupaten	cab. Donggala	2020 - 2024	Kementerian Kesehatan

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
		Sarana Bidang Kesehatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Usaha kesehatan berbasis masyarakat	1	Kabupaten	kab. Donggala	2020 - 2024	Kementerian Kesehatan
	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pengembangan standardisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja binalattas	Pelatihan Bidang Industri/ PBK	1	Kegiatan	kab. Donggala	2021 - 2024	Kementerian Ketenagakerjaan
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pendidikan dan pelatihan vokasi (penyuluhan kepada masyarakat)	Penyuluh / Pelatihan Kelompok Pelaku Utama	1	Kabupaten	kab. Donggala	2021 - 2024	Kementerian Perikanan dan Kelautan
Sarana dan Prasarana								
			Pembangunan PSU Rumah					
	Pelayanan Kesehatan dan JKN	Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Umum Provinsi Sulawesi Tengah dukungan rehabilitasi rumah rusak berat	1	Kabupaten	kab. Donggala	2020-2024	Kementerian Kesehatan

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
	Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi	Sarana Pengembangan Kawasan /Akses Internet	Pembangunan mang ICU dan NICU di RS Pratama Tambudan RS Tipe C Kabeloka	1	Kabupaten	kab. Donggala	2020-2024	Kementerian Kesehatan
		Sarana Pengembangan Kawasan/BTS / Lastmile	Pembangunan / Peningkatan Akses Sinyal Telepon dan Internet	1	Kabupaten	kab. Donggala	2020-2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika
			Penyediaan BTS 4G (4.0) di daerah yang blankspot di daerah tertinggal	45	Paket	Kec. Balaesang, Kec. Balaesang Tanjung, Kec. Banawa Selatan, Kec. Banawa Tengah, Kec. Pinembani, Kec. Rio Pakava, Kec. Sindue, Kec.	2021	Kementerian Komunikasi dan Informatika

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
						Sirenja, dan Kec. Sojo		
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	Pembangunan Sarana dan Prasarana KP	1	Kabupaten	kab. Donggala	2021-2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan
			Optimalisasi					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Air Minum yang layak	SPAM pascabencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala	3	Kabupaten	kab. Donggala	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan	Rehabilitasi, renovasi dan rekonstruksi sarana-prasarana sekolah / fasilitas pendidikan dasar (MYC Laniutan)	16	Unit	kab. Donggala	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemampuan Keuangan Daerah								
	Bimtek dan pembinaan pengelolaan aset desa	Bimtek dan pembinaan pengelolaan aset desa	Bimtek dan pembinaan pengelolaan aset desa	1	Kabupaten	kab. Donggala	2021-2024	Kementerian Dalam Negeri

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Pelatihan aparat pemerintah desa dan pengurus kelembagaan masyarakat desa	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	1	Kegiatan	kab. Donggala	2021-2024	Kementerian Dalam Negeri
	Penguatan kelembagaan pemerintah desa (peningkatan kompetensi pemerintah dan pengurus kelembagaan desa)	Penguatan kelembagaan pemerintah desa	Penguatan kelembagaan pemerintah desa	1	Kegiatan	kab. Donggala	2021-2024	Kementerian Dalam Negeri
Aksesibilitas								
	Fasilitasi pembangunan peningkatan jalan desa strategis	Fasilitasi pembangunan peningkatan jalan desa strategis	Pembangunan Jalan strategis	80	Km	Kec. Pinimbane - Kec. Balaesang Taniung	2021 - 2024	Kementerian Desa PDTT

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
	Infrastruktur konektivitas transportasi laut	Prasarana bidang konektivitas laut	Emergency Assistance For Rehabilitation And Reconstruction (DARR) Port Of Pantoloan Donggala Wani	1	Kegiatan	kab. Donggala	2021	Kementerian Perhubungan
	Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Preservasi Jalan Malala - Ogotua - Ogoamas - Tonggolobibi (MYC) (Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan)	12	Km	kab. Donggala	2021	
			Preservasi Jalan Malala - Ogotua - Ogoamas - Tonggolobibi (Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan)	156	Km	kab. Donggala	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Preservasi Jalan TompePantoloan-Surumana	2294	M	kab. Donggala	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
			(Preservasi Rutin Jembatan)					Perumahan Rakyat
			Preservasi Jalan Malala - Ogotua - Ogoamas - Tonggolobibi (Preservasi Jembatan)	26	M	kab. Donggala	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Preservasi Jalan TompePantoloan-Surumana (Preservasi Jembatan)	194	M	kab. Donggala	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Preservasi Jalan TompePantoloan - Surumana (Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan)	152	Km	kab. Donggala	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Preservasi Jalan TonggolobibiSaba ng-Tambu-Tompe (Preservasi Jembatan)	100	M	kab. Donggala	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
			Preservasi Jalan TonggolobibiSabanng-Tambu-Tompe (Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan)	110	Km	kab. Donggala	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Karakteristik Daerah								
	Budaya Sadar Bencana	Penyelenggaraan kegiatan mewujudkan masyarakat sadar bencana	Pelatihan ketahanan bencana dan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah tangguh bencana	1	Kabupaten	kab. Donggala	2021	Badan penanggulangan Bencana Nasional
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosia	Pengembangan usaha perhutanan sosial	93	Pendamping	kab. Donggala	2021 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
	Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana - Pembinaan Potensi SAR	Fasilitasi dan pembinaan masyarakat/pelatihan teknis potensi SAR	Fasilitasi dan pembinaan masyarakat/pelatihan teknis potensi SAR	50	Orang	Pantai Tanjung Karang	2021	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
Perekonomian Masyarakat								
Tojo Una - Una	BUM Desa yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan desa	BUM Desa yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan desa	BUM Desa yang dikembangkan untuk mendukung Produk Unggulan Desa	10	Desa	Kab. Tojo UnaUna	2021 - 2024	Kementerian Desa PDTT
			Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUM Desa	5	Kegiatan	Kab. Tojo UnaUna	2021 - 2024	Kementerian Desa PDTT
	Ketersediaan Akses dan konsumsi Pangan Berkualitas	Ketersediaan Akses dan konsumsi Pangan Berkualitas	Bantuan benih jagung hibrida	5000	Ha	Kec. Ulubongka, Kec. Ampana Tete, dan Kec. Toio	2021	Kementerian Pertanian

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
			Kawasan Transmigrasi Prioritas yang dikembangkan ekonominya	3	Kawasan	Kab. Tojo UnaUna	2021	Kementerian Pertanian
			Masterplan kawasan irigasi	1	Lokasi	Kec. Ulubongka	2021	Kementerian Pertanian
			Pemasaran hasil pertanian	6	Kegiatan	Kab. Tojo UnaUna	2021	Kementerian Pertanian
			Pembinaan dan pengembangan kopra putih	12	Kegiatan	Kab. Tojo UnaUna	2021	Kementerian Pertanian
			Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi jagung, cabai, kelapa, sapi potong	1	Lokasi	Kec. Una-Una, Kec. Tojo Barat, Kec. Walea Besar, dan Kec. Walea Kepulauan	2021	Kementerian Pertanian
			Penyelenggaraan bantuan ALSINTAN hand tractor dan Jonder	60	Unit	Kab. Tojo UnaUna	2021	Kementerian Pertanian

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
			Peremajaan tanaman kelapa	250	Ha	Kec. Tojo Barat, Kec. Toio, Ulubongka, Kec. Walea Besar, Kec. Walea Kepulauan, Kec. Togeana, Kec. Una-Una, Kec. Batudaka, Kec. Talatako, Kec. Ampana Tete, Kec. Ampana Kota, dan Kec. Ratulindo	2021	Kementerian Pertanian
	Pengembangan desa wisata	Pengembangan desa wisata di	Pembinaan SDM dan penguatan kapasitas desa	75	Orang	Kec. Una-Una dan	2021 - 2024	Kementerian Desa PDTT

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
	di daerah tertinggal	daerah tertinggal	wisata di daerah tertinggal			Kec. Tojo Barat		
			Pengembangan desa wisata dalam mendukung KSPN	20	Lokasi	Kec. Walea Kepulauan, Kec Walea Besar, Kec. Una-Una, Kec. Togean, Kec. Talatako, dan Kec. Batudaka	2021 - 2024	Kementerian Desa PDTT
	Pengembangan Literasi Digital bagi masyarakat	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat/ Literasi Digital	Literasi digital pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	100	Kegiatan	Kab. Tojo Una-Una	2020-2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika
	Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Fasilitasi dan pembinaan UMKM	Literasi digital pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal (UMKM)	1	Kabupaten	Kab. Tojo Una-Una	2021	Kementerian Perdagangan

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
	Penyelenggaraan Program Sembako	Bantuan keluarga (keluarga yang memperoleh bantuan sosial pangan sembako)	Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	4.360	KPM	Kab. Tojo Una-Una	2020-2024	Kementerian Sosial
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budi Daya	Bantuan alat penangkapan ikan	1	Kabupaten	Kab. Tojo Una-Una	2021-2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan
			Dermaga apung	1	Kabupaten	Kab. Tojo Una-Una	2021-2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan
			Premi Asuransi Nelayan	1	Kabupaten	Kab. Tojo Una-Una	2021-2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan
	Riset dan Inovasi IPTEK	Riset dan Inovasi IPTEK	Fasilitasi Smart Farming dalam rangka peningkatan produktivitas komoditi unggulan dan implementasi pertanian	5	Kegiatan	Kab. Tojo Una-Una	2021	Kementerian Pertanian

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
			presisi di daerah tertinggal (Drone sprayer, drone surveillance, soil and weather sensor, early warning system dan lainnya)					
	Smart Farming 4.0 (Penciptaan ekosistem) dan duta petani muda	Smart Fanning 4.0 (Penciptaan ekosistem) dan duta petani muda	Fasilitasi Smart Fanning dalam rangka peningkatan produktivitas komoditi unggulan dan implementasi pertanian presisi di daerah tertinggal (Drone sprayer, drone surveillance, soil and weather sensor, early warning system dan lainnya)	5	Kegiatan	Kab. Tojo Una-Una	2021-2024	Kementerian Desa PDTT

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
	Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di daerah tertinggal	Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di daerah tertinggal	Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di daerah tertinesal	5	Kegiatan	Kab. Tojo Una-Una	2021-2024	Kementerian Desa PDFT
			Pemasaran hasil pertanian	6	Kegiatan	Kab. Tojo Una-Una	2021-2024	Kementerian Desa PDFT
			Pembinaan dan pengembangankopra putih	12	Kegiatan	Kab. Tojo Una-Una	2021-2024	Kementerian DesaPDFT
			Peningkatan produksi, pengolahan, dan pemasaran komoditi perikanan tangkap	5	Kegiatan	Kab. Tojo Una-Una	2021-2024	Kementerian Desa PDFT
Sumber Daya Manusia								
	Kesehatan Masyarakat	Pelatihan Bidang Pendidikan tentang pertumbuhan bayi dan	Penanganan stunting	1	Kabupaten	Kab. Tojo Una-Una	2020-2024	Kementrian Kesehatan

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
		anak serta pembinaan gizi masyarakat						
	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pengembangan standardisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja binalattas	Pelatihan Bidang Industri/ PBK	96	Orang	Kab. Tojo Una-Una	2021-2022	Kementerian Ketenagakerjaan
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pendidikan dan pelatihan vokasi (penyuluhan kepada masyarakat)	Penyuluh / Pelatihan Kelompok Pelaku Utama	1	Kabupaten	Kab. Tojo Una-Una	2021-2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana dan Sarana								
	Ketersediaan Akses dan konsumsi Pangan Berkualitas	Ketersediaan Akses dan konsumsi Pangan Berkualitas	Pembangunan Embung	7	Paket	Kec. Ulubongka, Kec, Tojo Barat, Kec. Tojo, Kec. Tete, Kec, Una-Una, Kec. Togean,	2021	Kementerian Pertanian

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
						dan Kec. Talatako		
	Pengembangan Manajemen Koperasi	QDF/Koperasi yang difasilitasi sistem dieitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kab. Tojo Una-Una	2023-2024	Kementerian Koperasi dan UKM
	Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi	Sarana Pengembangan Kawasan/Akses Internet	Pembangunan / Peningkatan Akses Sinyal Telepon dan Internet	1	Kabupaten	Kab. Tojo Una-Una	2020-2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	Mesin dan Bahan Baku Pakan	1	Kabupaten	Kab. Tojo Una-Una	2021-2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana KP	1	Kabupaten	Kab. Tojo Una-Una	2021-2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan sanitasi yang layak	Pembangunan TPA sampah Kabupaten Tojo Una-Una (MYC)	15.000	KK	Kab. Tojo Una-Una	2021	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian
	Pengaturan, Penetapan, dan Pengawasan pada Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM Satu Harga	7	Lembaga Penyalur	Kab. Tojo Una-Una	2020-2024	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kemampuan Keuangan Daerah								
	Fasilitasi penerapan belanja APBD yang berorientasi pada SPM	Fasilitasi penerapan belanja APBD yang berorientasi pada SPM pelayanan dasar	Pemberian bantuan sarana-prasarana pemerintahan di perbatasan negara dan pulau-pulau	1	Kabupaten	Kab. Tojo Una-Una	2021-2024	Kementerian Dalam Negeri

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
	pelayanan dasar		kecil terluar					
	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Linekup Regional	Pelatihan aparat pemerintah desa dan pengurus kelembagaan masyarakat desa	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	1	Kegiatan	Kab. Tojo UnaUna	2021-2024	Kementerian Dalam Negeri
Aksesibilitas								
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Pembangunan / Rehabilitasi/Pengembangan Fasilitas Transportasi Darat	CAC-Sarana Bidang Konektivitas Darat	1	Unit	Kec. Ampana Kota	2021-2022	Kementerian Perhubungan
			CBP-Prasarana Bidang	2	Paket	Kec. Walea Kepulauan dan	2022-2024	Kementerian Perhubungan

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
			Konektivitas Darat			Kec. Walea Besar		
	Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Preservasi Jalan Ampana - Balingara - Bunta - Pagimana MYC	17	Km	Kab. Tojo Una-Una	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Preservasi Jalan Ampana - Balingara - Bunta - Pagimana (Pelebaran Jalan Menuju Standar)	1,0	Km	Kab. Tojo UnaUna	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Preservasi Jalan Ampana - Balingara - Bunta - Pagimana (Preservasi Rutin Jembatan)	1.407	M	Kab. Tojo UnaUna	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Preservasi Jalan Tagolu - Malei - Uekuli-Marowo-Ampana	4	Km	Kab. Tojo UnaUna	2021	Kementerian Pekerjaan Umum

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
			(Pelebaran Jalan Menuju Standar)					dan Perumahan Rakyat
			Preservasi Jalan Tagolu - Malei - Uekuli-Marowo-Ampana (Preservasi Rutin Jembatan)	1.841	M	Kab. Tojo UnaUna	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Preservasi Jalan Tagolu - Malei - Uekuli - Marowo - Ampana MYC (Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan)	9	Km	Kab. Tojo UnaUna	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Preservasi Jalan Ampana - Balingara - Bunta - Pagimana (Preservasi Jembatan)	300	M	Kab. Tojo UnaUna	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
			Preservasi Jalan Ampana - Balingara - Bunta - Pagimana (Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan)	160	Km	Kab. Tojo UnaUna	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Preservasi Jalan Tagolu - Malei - Uekuli-Marowo-Ampana (Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan)	145	Km	Kab. Tojo UnaUna	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Preservasi Jalan Tagolu - Malei - Uekuli - Marowo - Ampana MYC (Preservasi Jembatan)	7	M	Kab. Tojo UnaUna	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Karakteristik Daerah								

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
	Inventarisasi, verifikasi, dan pendampingan analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Pemulihan sarana dan prasarana sosial, ekonomi, dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Melaksanakan inventarisasi, verifikasi, dan pendampingan analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan daerah terdampak pascabencana	1	Kegiatan	Kab. Tojo UnaUna	2021	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Pengembangan usaha perhutanan sosial	44	Pendamping	Kab. Tojo UnaUna	2021-2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana - Pembinaan Potensi SAR	Fasilitasi dan pembinaan masyarakat/pelatihan teknis potensi SAR	Fasilitasi dan pembinaan masyarakat/pelatihan teknis potensi SAR	50	Orang	Pantai Ampana	2022	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
Sigi	Perekonomian Masyarakat							
	BUM Desa yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan desa	BUM Desa yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan desa	Fasilitasi pengembangan BUM Desa dan KUKM berbasis produk unggulan pertanian mendukung KEK Palu	15	Paket	Kab. Sigi	2021	Kementerian Desa PDTT
			Pelatihan manajemen keuangan koperasi/BUM Desa bersama/BUM Desa	1	Kegiatan	Kab. Sigi	2021	Kementerian Desa PDTT
	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Pembangunan rumah produksi mebel rotan dan kelapa	5	Unit	Kec. Dolo Selatan, Kec. Dolo Barat, Kec. Dolo, dan Kec. Gumbasa	2021-2024	Kementerian Perindustrian

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
			Peralatan home industry pangan komoditi unggulan pertanian dan perikanan serta rantai pasar yang baik	100	Paket	Kec. Sigi Biromaru, Kec. Tanambulava, Kec. Gumbasa, Kec. Kulawi, dan Kec. Lindu	2021	Kementerian Perindustrian
	Ketersediaan Akses dan konsumsi Pangan Berkualitas	Ketersediaan Akses dan konsumsi Pangan Berkualitas	Pembangunan kawasan kakao	5	Kegiatan	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pertanian
			Pemeliharaan kebun entres kakao tahun	1	Ha	Kec. Palolo, Kec. Kulawi, Kec. Pipikoro, dan Kec. Kulawi Selatan	2021	Kementerian Pertanian

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
			Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal melalui bantuan peningkatan nilai tambah prukades (jagung, packaging kopi, bawang goreng)	5	Kegiatan	Kec. Palolo	2021	Kementerian Pertanian
			Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kakao, sapi potong	1	Lokasi	Kec. Palolo, Kec. Kulawi, Kec. Pipikoro, dan Kec. Kulawi Selatan	2021	Kementerian Pertanian
			Peralatan home industry par, garr komoditi unggulan pertanian dan perikanan	100	Paket	Kec. Sigi Biromaru, Kec. Tanambulava, Kec. Gumbasa,	2021	Kementerian Pertanian

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
			serta rantai pasar yang baik			Kec. Kulawi, dan Kec. Lindu		
			Fasilitasi pengembangan BUM Desa dan KUKM berbasis produk unggulan pertanian mendukung KEK Palu	15	Paket	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pertanian
	Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik	Komunikasi Publik/Diseminasi Informasi melalui media Kominfo (GPR TV, Komik Komunika)	Komunikasi Publik/Diseminasi Informasi melalui media Kominfo (GPR TV, Komik Komunika)	1	Paket	Kab. Sigi	2021-2022	Kementerian Komunikasi dan Informatika

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
	Pengembangan desa wisata di daerah tertinggal	Pengembangan desa wisata di daerah tertinggal	Pengembangan desa wisata dalam mendukung KSPN	20	Lokasi	KSPN Lore Lindu Dskt	2021-2024	Kementerian Desa PDTT
	Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Fasilitasi dan pembinaan UMKM	Fasilitasi kemitraan pemasaran produk UKM	1	Kabupaten	Kab. Sigi	2021	Kementerian Perdagangan
	Penyelenggaraan Program Sembako	Bantuan keluarga (keluarga yang memperoleh bantuan sosial pangan sembako)	Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	6.353	KPM	Kab. Sigi	2020-2024	Kementerian Sosial
		Bantuan keluarga (keluarga yang memperoleh bantuan sosial pangan sembako)	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	15.154	KPM	Kab. Sigi	2020-2024	Kementerian Sosial

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budi Daya	Premi Asuransi Nelayan	1	Kabupaten	Kab. Sigi	2021-2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan
	Riset dan Inovasi IPTEK	Riset dan Inovasi IPTEK	Fasilitasi Smart Farming dalam rangka peningkatan produktivitas komoditi unggulan dan implementasi pertanian presisi di daerah tertinggal (Drone sprayer, drone surveillance, soil and weather sensor, early warning system dan lainnya)	5	Kegiatan	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pertanian

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
	Smart Farming 4.0 (Penciptaan ekosistem) dan duta petani muda	Smart Farming 4.0 (Penciptaan ekosistem) dan duta petani muda	Fasilitasi Smart Farming dalam rangka peningkatan produktivitas komoditi unggulan dan implementasi pertanian presisi di daerah tertinggal (Drone sprayer, drone surveillance, soil and weather sensor, early warning system dan lainnya)	5	Kegiatan	Kab. Sigi	2021-2024	Kementerian Desa PDTT
	Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di daerah tertinggal	Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di daerah tertinggal	Pembangunan rumah produksi mebel rotan dan kelapa	5	Unit	Kec. Dolo Selatan, Kec. Dolo Barat, Kec. Dolo, dan Kec. Gumbasa	2021-2024	Kementerian Desa PDTT

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
			Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal melalui bantuan peningkatan nilai tambah prukades fiagung, packaging kopi, bawang goreng)	5	Kegiatan	Kec. Palolo	2021-2024	Kementerian Desa PDDT
			Pengembangan jaringankoperasi berbasis pertanian	1	Kegiatan	Kab. Sigi	2021	Kementerian DesaPDDT
	Pendidikan, Pelatihan Vokasi, dan Penyuluhan	Pendidikan, Pelatihan Vokasi, dan Penyuluhan	Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat Desa melalui Penanaman dan Pengolahan Kopi dan Kakao	100	Orang	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pertanian
Sumber Daya Manusia								

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
	Fasilitasi pembangunan peningkatan jalan desa strategis	Fasilitasi pembangunan peningkatan jalan desa strategis	Sosialisasi Pelayanan Mobil Klinik Berjalan Sehat Sigi	2	Kegiatan	Kab. Sigi	2021	Kementerian Desa PDTT
	Kesehatan Masyarakat	Pelatihan Bidang Pendidikan tentang pertumbuhan bayi dan anak serta pembinaan gizi masyarakat	Penanganan stunting	1	Kabupaten	Kab. Sigi	2020-2024	Kementerian Kesehatan
		Sarana Bidang Kesehatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Usaha kesehatan berbasis masyarakat	1	Kabupaten	Kab. Sigi	2020-2024	Kementerian Kesehatan
	Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga	Orientasi Peningkatan Kesehatan Kerja bagi masyarakat	1	Kabupaten	Kab. Sigi	2020-2024	Kementerian Kesehatan

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
	Peningkatan Kualitas SDM	SCF/pengurus atau pengelola koperasi yang diberikan pelatihan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Organisasi dan Usaha Koperasi	10	Orang	Kab. Sigi	2023-2024	Kementerian Koperasi dan UKM
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pendidikan dan pelatihan vokasi (penyuluhan kepada masyarakat)	Penyuluh / Pelatihan Kelompok Pelaku Utama	1	Kabupaten	Kab. Sigi	2021-2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana dan Prasarana								
	Ketersediaan Akses dan konsumsi Pangan Berkualitas	Ketersediaan Akses dan konsumsi Pangan Berkualitas	Pembangunan greenhouse dan lantai jemur untuk pengembangan kopra putih	1	Kabupaten	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pertanian
	Pendistribusian jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus	Pendistribusian jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus	Pendistribusian jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus	1	Kabupaten	Kab. Sigi	2020-2024	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
	Pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan	Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Ralgrat	Pembangunan Pasar Maranatha yang roboh tanggal 28 September 2018 akibat gempa	1	Kabupaten	Kab. Sigi	2022	Kementerian Perdagangan
	Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi	Sarana Pengembangan Kawasan/Akses Internet	Pembangunan / Peningkatan Akses Sinyal Telepon dan Internet	1	Kabupaten	Kab. Sigi	2020-2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika
		Sarana Pengembangan Kawasan/BTS / Lastmile	Penyediaan BTS 4G (4.0) di daerah yang blankspot di daerah tertinggal	48	Paket	Kec. Dolo Barat, Kec. Dolo Selatan, Kec. Gumbasa, Kec. Kinovaro, Kec. Kulawi, Kec. Kulawi Selatan,	2021	Kementerian Komunikasi dan Informatika

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
						Kec. Lindu, Kec. Marawola Barat,		
						Kec. Palolo, dan Kec. Pipikoro		
	Program Ketahanan Sumber Daya Air	Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku	Pembangunan Intake dan jaringan transmisi Air Baku Paneki di Sigi	0,1	Km	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Works for PASIGALA raw utater transmi. ssion system rehabilitation (Paket I dan 21	0,1	Km	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
		Pengembangan jaringan irigasi permukaan, rawa, dan non-padi (hanya irigasi primer)	Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKn.S4 - BGKn.S9)	7	Km	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Improvement of Secondary, Tertiary, Drainage Channels and Paddy Field Recovery	1	Km	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
			Rehabilitation of Paneki Irrigation System (Intake, Main, Secunder and Tertiary Canal-274 ha) and Bangga Irrigation System (Main, Secunder and Tertiary Canal-310 ha)	1	Km	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Work for Tertiary Channels of Gumbas Irrigation System (BGKn.1 - BGKn.7)	1	Km	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
			Rehabilitation and Re construction of Gumbasa Irrigation Sgstem (Main Canal BGKn.24-BGKn.42-2458 hectares) 9Km, (Main Canal BGKn.42-BGKn.S4-1815 hectares) 7Km, (Weir and Main Canal BGKn.7 - BGKn.24 - 2695 hectares) TOKw	26	Km	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Rehabilitation D.I. Gumbasa Weir and Groundsill Constntction, Sigi, SulauesiTengah, 0 km, 0 hektar, F, K, MYC	1	Bendung	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	Mesin dan bahan baku pakan	1	Kabupaten	Kab. Sigi	2021-2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana KP	1	Kabupaten	Kab. Sigi	2021-2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan air minum yang layak	Optimalisasi SPAM pasca bencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala	3	Unit	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Pembangunan IPA Kap.20 L/det dan jaringan perpipaan SPAM Huntap Pombewe Kabupaten Sigi (CSRRP)	20	Liter/De tik	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
			Pembangunan jaringan perpipaan SPAM IKK Bora untuk Kawasan Huntap Pombewe Kabupaten Sigi (CSRRP)	1	Unit	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung	Central Sulanlesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP)	157	Ha	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	Pembangunan TPA sampah Kabupaten Sigi (Lanjutan)	15.000	KK	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan	Rehabilitasi, renovasi dan rekonstruksi sarana-prasarana sekolah/ fasilitas pendidikan	11	Unit	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
			dasar (MYC Laniutan)					
	Pengaturan, Penetapan, dan Pengawasan pada Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM Satu Harga	3	Lembaga Penyalur	Kab. Sigi	2020-2021	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kemampuan Keuangan Daerah								
	Bimtek dan pembinaan pengelolaan aset desa	Bimtek dan pembinaan pengelolaan aset desa	Bimtek dan pembinaan pengelolaan aset desa	1	Kabupaten	Kab. Sigi	2021-2024	Kementerian Dalam Negeri

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
	Fasilitasi penerapan belanja APBD yang berorientasi pada SPM pelayanan dasar	Fasilitasi penerapan belanja APBD yang berorientasi pada SPM pelayanan dasar	Pemberian bantuan sarana-prasarana pemerintahan di perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar	1	Kabupaten	Kab. Sigi	2021-2024	Kementerian Dalam Negeri
	Fasilitasi peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah	Evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi	Fasilitasi peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah	1	Kabupaten	Kab. Sigi	2021-2024	Kementerian Dalam Negeri
	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Masyarakat Desa Lingkup Regional	Pelatihan aparat pemerintah desa dan pengurus kelembagaan masyarakat desa	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Masyarakat Desa Lingkup Regional	1	Kegiatan	Kab. Sigi	2021-2024	Kementerian Dalam Negeri

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
	Penguatan kelembagaan pemerintah desa (peningkatan kompetensi pemerintah dan pengurus kelembasaan desa)	Penguatan kelembagaan pemerintah desa	Penguatan kelembagaan pemerintah desa	1	Kegiatan	Kab. Sigi	2021-2024	Kementerian Dalam Negeri
Aksesibilitas								
	Fasilitasi pembangunan peningkatan jalan desa strateRis	Fasilitasi pembangunan peningkatan jalan desa strategis	Pembangunan / peningkatan jalan desa strategis di Daerah Tertinggal	5	Kegiatan	Kab. Sigi	2021-2024	Kementerian Desa PDTT
	Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Pembangunan Usulan Ruas Jalan Nasional (Trans Tengah Sulawesi)- Ruas Palu - Kulawi - Gimpu - Peana - Seko (Bts Sulsel)	1	Kabupaten	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Karakteristik Daerah								

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
	Ketersediaan Akses dan konsumsi Pangan Berkualitas	Ketersediaan Akses dan konsumsi Pangan Berkualitas	Pengembangan usaha tanaman pekarangan bagi kelompok perempuan pascabencana	20	Kelompok	Kec. Sigi Biromaru, Kec. Dolo Barat, Kec.	2021	Kementerian Pertanian
			melalui pengembangan Rumah Pangan Lestari			Dolo Selatan, Kec. Tanambulava, Kec. Kulawi, Kec. Lindu, dan Kec. Kulawi Selatan		
	Program Ketahanan Sumber Daya Air	Pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai	Polder Sgstem Pilot Project in Lende Sirenja Village	1	Unit	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
			Riuer Improvement (Down Stream of Palu Riuer Considering Tsunami Countermeasure)	1	Unit	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Countermeasure for Liquefaction - Landslide in Balaroa, Jono Oge, Petobo, Sibalaga	1	Unit	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Flood and Sediment Disaster Countermeasure against relocation areas in Dugu, Petobo, Pombeute, Tondo	1	Unit		2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
			Riuer Improvement and Sediment Control in Middle Stream of Palu Riuer Tributary, Bangga Riuer, Kulau Riuer, Leutara Riuer, Miu Riuer, Namo Riuer, Omu Riuer, Paneki Riuer, Paneki Riuer (Middle Stream Nalodo Area), Poboga Riuer, Poi Riuer, Salua Riuer, Tuua Riuer	1	Unit	Kab. Sigi	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Penguksuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	3.031	Ha	Kab. Sigi	2020-2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi/Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program-Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volume	Satuan	Lokasi	Tahun Anggaran	Penanggung Jawab
Perekonomian Masyarakat								
		Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Pengembangan usaha perhutanan sosial	46	Pendamping	Kab. Sigi	2020-2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana - Pembinaan Potensi SAR	Fasilitasi dan pembinaan masyarakat/pelatihan teknis potensi SAR	Fasilitasi dan pembinaan masyarakat/pelatihan teknis potensi SAR	50	Orang	Kec. Sigi Biromaru	2021	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Tabel 3.3
APBD 2022 - 2024

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 Ha	Perbaikan Rumah Tidak layak Huni (Tersedianya fasilitas MCK)	Pembangunan MCK bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	120	Unit		2022 - 2024	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN (Bidang Kawasan Permukiman)
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Tersedianya jumlah permukiman yang terfasilitasi PSU	Pembangunan drainase dan jalan lingkungan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	149	Desa		2022 - 2024	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN (Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas)

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.	Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Bantuan Alat Percetakan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	1	Unit	Kab Sigi (Desa Kalukubula)	2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Bantuan Usaha Ekonomi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	1	Paket	Kab. Donggala (Desa	2023	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
					Sum ur	Tojo una-una	2023	Dinas ESDM Prov
					Sum ur	Tojo una-una	2023	Dinas ESDM Prov
					Sum ur	Tojo una-una	2024	Dinas ESDM Prov
					Sum ur	Tojo una-una	2024	Dinas ESDM Prov
					Sum ur	Tojo una-una	2024	Dinas ESDM Prov
					Sum ur	Tojo una-una	2024	Dinas ESDM Prov
					Sum ur	Tojo una-una	2024	Dinas ESDM Prov
					Sum ur	Tojo una-una	2024	Dinas ESDM Prov
					Sum ur	Tojo una-una	2024	Dinas ESDM Prov
					Sum ur	Tojo una-una	2025	Dinas ESDM Prov
					Sum ur	Tojo una-una	2025	Dinas ESDM Prov
					Sum ur	Tojo una-una	2025	Dinas ESDM Prov

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN							
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana PJU-TS Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pemasangan Lampu Jalan PJU-TS untuk Masyarakat Tidak Mampu	Pembangunan Sarana PJU-TS Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	26	unit	Donggal a	2022 - 2026	Dinas ESDM Prov
		Pemasangan Lampu Jalan PJU-TS untuk Masyarakat Tidak Mampu	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	24	unit	Sigi	2022 - 2026	Dinas ESDM Prov
		Pemasangan Lampu Jalan PJU-TS untuk Masyarakat Tidak Mampu	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	13	unit	Tojo una-una	2022 - 2026	Dinas ESDM Prov

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN							
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pemasangan Instalasi Listrik dan KWH Meter untuk Masyarakat Tidak Mampu	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	5.000	SR	Donggal a	2022 - 2026	Dinas ESDM Prov
		Pemasangan Instalasi Listrik dan KWH Meter untuk Masyarakat Tidak Mampu	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.500	SR	Sigi	2022 - 2026	Dinas ESDM Prov
		Pemasangan Instalasi Listrik dan KWH Meter untuk Masyarakat Tidak Mampu	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang,	3.500	SR	Tojo una-una	2022 - 2026	Dinas ESDM Prov

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
			Daerah Terpencil dan Perdesaan					
	program peningkatan sarana distribusi perdagangan	pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas	penataan,pembin aan dan pengembangan pasar lelang komoditas	5	Reko men dasi	kabupat en banggai dan kab, lainya	2022	Dinas perindustrian dan perdagangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.	Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Bantuan Alat Percetakan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	1	Unit	Kab Sigi (Desa Kalukubula)	2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Bantuan Usaha Ekonomi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	1	Pake t	Kab. Donggala (Desa Kambayan)	2023	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA						

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
		N SARANA PERTANIAN						
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan Sarana Pertanian						
		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Bantuan Pengembangan Kapasitas Kelompok Tani Hand Sprayer Elektrik	5	Unit	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			Dukungan Alat dan Mesin Pertanian					
			1. Combine Harvester	2	Unit	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			2. Hand Traktor	15	Unit	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Pengembangan Komoditas Buah Seksi Buah dan Florikultura					
			1. Pengadaaan Bibit Alpukat Ijo Bundar	1.618	Bata ng	Kabupat en Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			Pengadaan Bibit Durian Montong	2.143	Bata ng	Kabupat en Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			2. Pengadaaan Bibit Alpukat Ijo Bundar	4.850	Bata ng	Kabupat en Tojo Una- Una	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			Pengadaan Bibit Durian Montong	1.000	Bata ng	Kabupat en Tojo Una- Una	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
			3. Pengadaan Bibit Durian Kani	2.143	Bata ng	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			Pengembangan Komoditas Buah (Smart Village Desa Pakuli)					
			1. Pengadaan Bibit Alpukat Ijo Bundar	300	Bata ng	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			2. Pengadaan Bibit Mangga Arum Manis	300	Bata ng	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			3. Pengadaan Bibit Pisang Kepok	300	Bata ng	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			4. Pengadaan Benih Pepaya California	35	Sach et	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit	Bantuan Benih Kacang Tanah (seksi AKABI)					

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
		Tanaman Pangan						
			1. Kacang Tanah	3.600	Kg	Kabupat en Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			Bantuan Benih Kedelai (seksi AKABI)					
			1. Kedelai	5.000	Kg	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			SEKSI SEREALIA					
			1. Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Jagung Hibrida 150 Ha	15	Kg	Kabupat en Tojo Una- Una	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			2. Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Padi 500 Ha	25	Kg	Kabupat en Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
			3. Dukungan Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Jagung Hibrida 118 Ha	15	Kg	Kabupat en Tojo UnaUna	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N PRASARANA PERTANIAN						
		Penataan Prasarana Pertanian						
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usahatani	Dukungan Rehabiltasi/ Pembangunan Jalan Usaha Tani 10					
			1. kec. sojol 2	329	Mete r	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
			2. kec. sojol 3	329	Mete r	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			3. kec. Sojol	329	Mete r	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			Dukungan Rehabiltasi/ Pembangunan Jalan Usaha Tani 2					
			1. Desa Ogoamas 1 Kec. Sojol Utara	##### ###	Mete r	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			Dukungan Rehabiltasi/ Pembangunan Jalan Usaha Tani 3					
			1. Desa Bobo Kec. Dolo	450	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			2. Desa Palempea Kec. Pipikoro	450	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
			3. Desa Wotunonju Kec. Sigi Biromaru	450	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			Dukungan Rehabiltasi/ Pembangunan Jalan Usaha Tani 4					
			1. kecamatan dolo barat	439	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			2. kec. dampelas 2	439	Mete r	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			3. kec. dampelas 3	439	Mete r	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			4. kec. Dampelas	439	Mete r	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			5. kec. Dolo	439	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
			6. Kec. Nokilalaki	439	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			7. kec. palolo 2	439	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			8. kec. Palolo	439	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			9. kec. sigi biromaru 2	439	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			10. kec. sigi biromaru 3	439	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			11. kec. sigi biromaru 4	439	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			12. Kec. Sigi Biromaru	439	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			13. kec. sindue 2	439	Mete r	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
			14. kec. Sindue	439	Mete r	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			Dukungan Rehabiltasi/ Pembangunan Jalan Usaha Tani 5					
			1. Kecamatan dolo barat	439	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			2. kecamatan marawola barat	439	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			3. kec. banawa selatan	439	Mete r	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			4. kec. marawola barat 2	439	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			5. kec. marawola barat 3	439	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
			6. kec. marawola barat	439	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			7. kec. palolo 2	395	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			8. Kec. Palolo	439	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			Dukungan Rehabiltasi/ Pembangunan Jalan Usaha Tani 6					
			1. Kec. Sigi Biromaru	307	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			2. kec. Sindue	307	Mete r	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			Dukungan Rehabiltasi/ Pembangunan Jalan Usaha Tani 7					

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
			1. kec. Dampelas	395	Mete r	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			2. Kec. Palolo	220	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			3. Kec. Sigi Biromaru	329	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			Dukungan Rehabiltasi/ Pembangunan Jalan Usaha Tani 8					
			1. kec. dampelas 2.	439	Mete r	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			2. kec. Dampelas	439	Mete r	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			3. kec. dolo selatan	329	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
			4. kec. Marawola	439	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			5. Kec. Sindue Tobata	439	Mete r	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			6. kec. sojol 2	410.4 65	Mete r	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			7. Kec. Sojol	439	Mete r	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			8. Kec. Sojol Utara 2	439	Mete r	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			9. Kec. Sojol Utara 3	439	Mete r	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			10. Kec. Sojol Utara	439	Mete r	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan					

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
			Jalan Usaha Tani (JUT)					
			1. Kab. Donggala 1	439	Mete r	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
			2. Kec. Sigi Biromaru	439	Mete r	Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usahatani	Dukungan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi (JITUT/JIDES)/ IrigasiTanah Dalam/Tanah Dangkal 3					
			1. Desa Guntarano Kec. Tanantovea	150	Mete r	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
			Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi (JITUT/JIDES) / Irigasi Tanah Dalam / Irigasi Tanah Dangkal					
			1. Kabupaten Donggala	150	Mete r	Kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
PROGRAM PENYELEN GGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTA N JALAN	PERSENTASE PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN							
Kegiatan Penyediaan Perlengkap an Jalan Di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan Di jalan Provinsi	Tersedianya Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi						

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
		1	Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	53	Unit	Seluruh Kab/Kot a Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	2022 - 2026	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
		2	Marka Jalan	83371	Mete r	Seluruh Kab/Kot a Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	2022 - 2026	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
		3	Rambu Jalan	1158	Bua h	Seluruh Kab/Kot a Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	2022 - 2026	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
		4	Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	24	Bua h	Seluruh Kab/Kot a Wilayah Provinsi	2022 - 2026	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
						Sulawesi Tengah		
		5	Guadrail	680	Mete r	Seluruh Kab/Kot a Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	2022 - 2026	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
Kegiatan Rehabilitas i Dan Pemelihara an Perlengkap an Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terpelihara	Terpeliharanya Fasilitas Perlengkapan Jalan						
		1	Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	15	Unit	Kota Palu	2022 - 2026	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
		2	Rambu Jalan	230	Bua h	Seluruh Kab/Kot a Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	2022 - 2026	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dukungan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Rehabilitasi PPI Donggala	1	Kabu pate n	kab. Donggal a	2022- 2024	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dukungan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Rehabilitasi Unit- unit Perbenihan dalam rangka Penyediaan Benih Unggul	1	Kabu pate n	Kab. Sigi	2022- 2026	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	89,968 %						DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Sub Keg : Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	89934 meter						
	Pembangunan D.I Balukang II (Lanjutan) (SUMBER DANA DAK)		1	Paket	1 Paket	DGGL	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Sub Keg : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	15975 meter						
	Bantuan Irigasi Perpipaan Kelompok Nipotowe Desa Mantikole Kab. Sigi		1	Paket	1 Paket	SIGI	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	BANTUAN SALURAN AIR PERSAWAHAN DESA PORAME KEC. KINOVARO KAB. SIGI		1	Paket	1 Paket	SIGI	2022	
	Bantuan Saluran Air Persawahan Desa Uwemanje Kab. Sigi		1	Paket	1 Paket	SIGI	2022	

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	PEMBANGUNAN TANGGUL DAN SALURAN IRIGASI, DUSUN 3 DESA KALEKE, KEC. DOLO KAB. SIGI		1	Paket	1 Pake t	SIGI	2022	
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1673,73 Ha						DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	5923,90 meter						
	Pembangunan Talud Desa Doda Kab. Sigi		1	Paket	1 Pake t	SIGI	2022	
	Pembangunan Talud Desa Bhakti Agung Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso		1	Paket	1 Pake t	DGGL	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Desa Saloya Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala		1	Paket	1 Pake t	DGGL	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pembangunan Turap Penahan Tanah (TPT) Desa Ogoamas II Kec. Sojol Utara Kab. Donggala		1	Paket	1 Pake t	DGGL	2022	
	Tembok Penahan Abrasi Sungai Desa Tibo Kab. Donggala Sindue Tombusabora Tibo		1	Paket	1 Pake t	DGGL	2022	
	Tembok Penahan Abrasi Sungai Desa Tibo Kab. Donggala Sindue Tombusabora Tibo		1	Paket	1 Pake t	DGGL	2022	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sewall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	5953,50 meter						

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Abrasi Pantai Desa Matobiai Kec. Togean Kab. Tojo Una-una		1	Paket	1 Pake t	TOUNA	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Abrasi Pantai Desa Tongkabo Kec. Togean Kab. Tojo Una-una		1	Paket	1 Pake t	TOUNA	2022	
	Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Desa Bambu Kab. Tojo Una-una		1	Paket	1 Pake t	TOUNA	2022	
	Pembangunan Pengaman Pantai Boneaoge Kec. Banawa Kab. Donggala		1	Paket	1 Pake t	DGGL	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pembangunan Pengaman Pantai Boneaoge Kec. Banawa Kab. Donggala		1	Paket	1 Pake t	DGGL	2022	
	Pembangunan Pengaman Pantai Desa Enu Kab. Donggala		1	Paket	1 Pake t	DGGL	2022	

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pembangunan Pengaman Pantai Desa Salinggaho Dusun Tumpang Kab. Tojo Una-una		1	Paket	1 Pake t	TOUNA	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala		1	Paket	1 Pake t	DGGL	2022	
	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	8925 meter						
	Bronjong Dusun III Desa Lero Tatari Kec. Sindue Kab. Donggala		1	Paket	1 Pake t	DGGL	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Bronjong Penembokan Desa Penggalasing Desa Penggalasing Kec. Sojol Kab Donggala		1	Paket	1 Pake t	DGGL	2022	
	Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Tompe Desa Tompe dan Balentum Kec. Sirenja Kab. Donggala		1	Paket	1 Pake t	DGGL	2022	

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Desa Kampung Baru Kab. Donggala		1	Paket	1 Pake t	DGGL	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Desa Alindau Kab. Donggala		1	Paket	1 Pake t	DGGL	2022	
	Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Desa Ogoamas I Kab. Donggala		1	Paket	1 Pake t	DGGL	2022	
	Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Desa Ponggerang Kab. Donggala		1	Paket	1 Pake t	DGGL	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Normalisasi/Perkuatan Tebing Sungai Tompe Desa Tompe dan Balentum Kec. Sirenja Kab. Donggala		1	Paket	1 Pake t	DGGL	2022	
	Normalisasi Sungai Pilimakujawa Kulawi Selatan Kab. Sigi		1	Paket	1 Pake t	SIGI	2022	

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	300,00 Liter/Detik						DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Keg : Sub Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	12,5 liter/det						
	Pembangunan SPAM Desa Loli Tasiburi Dan Loli Pesua Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala		1	Paket	1 Paket	DGGL	2022	
	Pembangunan SPAM Dusun Kololu Kelurahan Ganti Kabupaten Donggala		1	Paket	1 Paket	DGGL	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pembangunan SPAM Dusun Lapalong Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala		1	Paket	1 Paket	DGGL	2022	

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pembangunan SPAM Desa Gimpu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi		1	Paket	1 Pake t	SIGI	2022	
	Pembangunan SPAM Desa Jono Oge RT. 04 Dusun I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi		1	Paket	1 Pake t	SIGI	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pembangunan SPAM Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi		1	Paket	1 Pake t	SIGI	2022	
	Pembangunan SPAM Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una		1	Paket	1 Pake t	TOUNA	2022	
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	42 Unit						DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Sub Keg : Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	40 Rumah Tangga						
	Belanja Modal Pembangunan Jamban Keluarga Desa Cendana Kab. Tojo Unauna		1	Paket	1 PAK ET	TOUNA	2022	
	Belanja Modal Pembangunan Jamban Keluarga Desa Pulau enam, Togeana Kab. Tojo Unauna		1	Paket	1 PAK ET	TOUNA	2022	
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	444 Unit						DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Sub Keg : Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	1750 Ha						
	Pembangunan Drainase Desa Panggalasiang Kec. Sojol Kab. Donggala		1	Paket		DGGL	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	pembangunan drainase desa saloya dusun VI kec. sindue tambusambora kab. Donggala		1	Paket		DGGL	2022	
	Pembangunan Drainase Desa Samalili, Kab. Donggala		1	Paket		DGGL	2022	
	Pembangunan Drainase Desa Sansarino Kec.Ampana Kota, Kab. Tojo Una Una		1	Paket		TOUNA	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pembangunan Drainase Desa Surumana, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala		1	Paket		DGGL	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pembangunan Drainase Desa Tanamea, Kec. Banawa Selatan, Kab Donggala		1	Paket		DGGL	2022	
	Pembangunan Drainase Desa Winatu Kec. Kulawi Kab. Sigi Kab. Sigi		1	Paket		Sigi	2022	
	Pembangunan Drainase Kel.Boya, Kab. Donggala		1	Paket		DGGL	2022	
	Pembangunan Drainase Lipulalongo, Kec. Labobo Kab. Banggai Laut		1	Paket		DGGL	2022	
	Pembangunan Drainase Ogoamas I, Kab. Donggala, Sojol Utara		1	Paket		DGGL	2022	

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pembangunan Plat Deker/Drainase Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	29 Kawasan						
	Sub Keg : Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Kegiatan						
	Perencanaan Jalan Lingkungan Desa Kota Rindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi		1	Doku men		SIGI	2022	
	Perencanaan Jalan Lingkungan Jalan Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi		1	Doku men		SIGI	2022	

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	507,00 Paket						DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Sub Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	507 Paket						
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Loru, Dusun I, Lrg. Hidroponik, Kab. Sigi		1	Paket	LAPEN P= 425 m, L= 2,5m	SIGI	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Lorong Labere Desa Sibedi Dusun 2 Kec. Marawola Kab. Sigi		1	Paket	LAPEN P= 357 m,	SIGI	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
					L= 3m			
	Pekerjaan Jalan Lingkungan RT. 17 Dusun 4 Desa Lolu, Biromaru Lorong Habitat Kab. Sigi		1	Paket	LAPE N P= 310, 5m, L= 3m	SIGI	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Jalan Desa Maku, Kec. Dolo Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Jalan Serut, Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi		1	Paket	LAPE N P= 357 m, L= 3m	SIGI	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pekerjaan Jalan Lingkungan BTN Kelapa Gading, Kalukubula, Kab. Sigi		1	Paket	LAPE N P= 247 m, L= 3m	SIGI	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Kompleks Perumahan Sou Nagaya Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi		1	Paket	LAPE N P= 357 m, L= 3m	SIGI	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Boya Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Poros Jalan Baru Sauna Desa Padende Kec. Marawola Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Berdikari Kec. Palolo Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Lembantongoa kec. Palolo Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Ranteleda Kec. Palolo Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Rejeki Kec. Palolo Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Tanah Harapan Kec. Palolo Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Tongoa Kec. Palolo Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Uenuni Kec. Palolo Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Baku Bakulu Kec. Palolo Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Bobo Kec. Palolo Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	
	Pekerjaan Jalan dan Pembangunan Plat Dueker Desa Doda Kec. Kinovaro Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Loru Kec. Sigi Biromaru Kab. (Jl. Sou Euo) Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Oloboju Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Loru, Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi (Jl. Maria Djaelangara) Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Pembewe Kec. Sigi Biromaru (Jl. Lawira) Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan/Pengerasan (Lapen) Desa Ngata Baru Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Makmur Kec. Palolo Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Jalan Poros Palu - Palolo, Ranteleda Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pekerjaan Jalan Lingkungan SMKN 2 Desa Gimpu Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	
	Pembangunan/Peningk atan Jalan dan Drainase Lingkungan Desa Kotarindau Kec. Dolo Kab. Sigi		1	Paket		SIGI	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Ogoamas I Kec. Sojol Utara Kab. Donggala		1	Paket		DGGL	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Panggalasiang Kec. Sojol Kab. Donggala		1	Paket		DGGL	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Dusun IV Simanisi Desa Siwalempu Kec. Sojol Kab. Donggala		1	Paket		DGGL	2022	

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Sipi Kab. Donggala		1	Paket	LAPEN P=140 m, L=3m (SANDSET P=263 m, L=3m)	DGGL	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala		1	Paket	LAPEN SANDSET P=196, 5m, L=3m	DGGL	2022	

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Salumbone kec. Sindue Kab. Donggala		1	Paket	LAPE N P= 357 m, L= 3m	DGGL	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Dalaka kec. Sindue Kab. Donggala		1	Paket	LAPE N P= 357 m, L= 3m	DGGL	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala		1	Paket		DGGL	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Dusun III Desa Lero Tatari Kec. Sindue Kab. Donggala		1	Paket	LAPE N P= 357 m, L= 3m	DGGL	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Permohonan Bantuan Penanganan Infrastruktur Desa Guntarano Kec. Tanantovea Kab. Donggala		1	Paket	LAPEN SAN DSE ET P= 196, 5m, P= 3m	DGGL	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Kaliburu kec. Sindue Kab. Donggala		1	Paket	LAPEN P= 357 m, L= 3m	DGGL	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Labuan Kec. Sindue Kab. Donggala		1	Paket	LAPEN P= 355 m, L= 3m	DGGL	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Lero Kec. Sindue Kab. Donggala		1	Paket	LAP E N P= 340 m, L= 3m	DGGL	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Lero Tatari Kec. Sindue Kab. Donggala		1	Paket	LAP E N S AN D S E T P= 3m, L= 3m	DGGL	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Nupabomba kec. tanantovea Kab. Donggala		1	Paket	LAP E N P= 140 m, L= 3m (S AN D S E T	DGGL	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
					P= 263 m, L= 3m)			
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Wani I Kec. Tanantovea Kab. Donggala		1	Paket	LAP E N S A N D S E T P= 196, 5m, L= 3m	DGGL	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Guntarano kec. Tanantovea Kab. Donggala		1	Paket	LAP E N P= 357 m, L= 3m	DGGL	2022	

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Wani 2 Dusun 4 Kec. Tanantovea Kab. Donggala		1	Paket	LAPE N P= 265 m, L= 3,5	DGGL	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Labuan Lelea Kec. Labuan Kab. Donggala		1	Paket	LAPE N P= 305 m, L= 3,5	DGGL	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Labuan Panimba Kec. Labuan Kab. Donggala		1	Paket	LAPE N P= 356 m, L= 3m	DGGL	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Dusun Kololu Kel. Ganti Kab. Donggala		1	Paket		DGGL	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Dusun Lapaloang Kel. Ganti Kab. Donggala		1	Paket		DGGL	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Dusun Vandu Desa Salubomba Kab. Donggala		1	Paket	LAP E N P= 247 m, L= 3m	DGGL	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Boneoge, Kec. Banawa Kab. Donggala		1	Paket		DGGL	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Kelurahan Gunung Bale Kab. Donggala		1	Paket		DGGL	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Tombiano, Kab. Tojo Una-una, Tojo Barat, Tombiano		1	Paket		TOUNA	2022	

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Buntongi Kec. Sabulira Toba Kec. Tojo Una-Una		1	Paket	SAN DSE ET P= 367 m, L= 3m	TOUNA	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Cempa Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una		1	Paket	RAB AT P= 310 m, L=3 m	TOUNA	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una		1	Paket	LAPE N P= 302 m, L= 3m	TOUNA	2022	

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Marowo Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una		1	Paket	LAP E N P = 176 m, L= 3m	TOUNA	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Podi Dusun Kainyole Kec. Tojo Kab. Tojo Una-Una		1	Paket	LAP E N P = 275 m, L= 3,5m	TOUNA	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Saluaba Kec. Sabulira Toba Kab. Tojo Una-Una		1	Paket	LAP E N P = 302 m, L= 3m	TOUNA	2022	

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Tayawa Kec. Tojo Kab. Tojo Una-Una		1	Paket	LAP E N S A N D S E T P= 365 m, L= 3m	TOUNA	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Tongkabo Dusun Panabali Melam Kec. Togean Kab. Tojo Una- Una		1	Paket	RAB AT P= 304 m, L= 2m	TOUNA	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Uebone Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una		1	Paket	LAP E N P= 320 m, L= 3m	TOUNA	2022	

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una		1	Paket	LAPEN P=330 m, L=3m	TOUNA	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pekerjaan Jalan Lapisan Penetrasi (Lapen) Desa Wakai Kab. Tojo Una-Una		1	Paket	SANDET P=330 m, L=3,5m	TOUNA	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Lemora Kec. Tojo Kab. Tojo Una-Una		1	Paket	RABAT P=189 m, L=3m	TOUNA	2022	

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Bahari Kec. Tojo Kab. Tojo Una-Una		1	Paket	LAP E N P= 320 m, L= 3m	TOUNA	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Luangon Kec. Una-Una Kab. Tojo Una-Una		1	Paket	RAB AT P= 218 m, L= 3,2m	TOUNA	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Malei Tojo, Tojo Barat Kab. Tojo Una-Una		1	Paket	SAN DSE ET P= 281 m, L= 4m	TOUNA	2022	

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Pusungi, Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una		1	Paket	LAPE N P= 247 m, L= 3m	TOUNA	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Tanamawau, Tojo Barat Kab. Tojo Una-Una		1	Paket	LAPE N P= 247 m, L= 3m	TOUNA	2022	
	Pekerjaan Rabat Beton Jalan Lingkungan Desa Bahari Dusun II, Tojo Kab. Tojo Una-Una		1	Paket	LAPE N P= 310, 5m, B= 3m	TOUNA	2022	
	Pekerjaan Rabat Beton Jalan Lingkungan Desa Baulu, Togeana Kab. Tojo Una-Una		1	Paket	LAPE N P= 247 m,	TOUNA	2022	

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
					B= 3m			
	Pekerjaan Rabat Beton Jalan Lingkungan Desa Kabalutan, Talatako Kab. Tojo Una-Una		1	Paket	LAPE N P= 247 m, B= 3m	TOUNA	2022	
	Pekerjaan Rabat Beton Jalan Lingkungan Desa Pautu, Talatako Kab. Tojo Una-Una		1	Paket	LAPE N P= 247 m, B= 3m	TOUNA	2022	
	Pekerjaan Rabat Beton Jalan Lingkungan Desa Una-Una Kab. Tojo Una-Una		1	Paket	LAPE N P= 357 m, B= 3m	TOUNA	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pekerjaan Setapak Cor Desa Bomba Kec. Una- Una Kab. Tojo Una-Una		1	Paket	RAB AT P= 165 m, L= 4,4m	TOUNA	2022	
	Pekerjaan Setapak Cor Desa Lebiti Kec. Togean Kab. Tojo Una-Una		1	Paket	LAPE N P= 357 m, C= 3m	TOUNA	2022	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Tampa Batu Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-una		1	Paket	LAPE N P= 357 m, L= 3m	TOUNA	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	300,00 Liter/Detik						

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Sub Keg : Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	12 liter/detik						
	Pemeliharaan Jaringan SPAM Lokasi Desa Berdikari Kabupaten Sigi		1	Kegiat an		SIGI	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pemeliharaan Jaringan SPAM Lokasi Desa Labuan Toposo Kabupaten Donggala		1	Kegiat an		DGGL	2022	
	Pemeliharaan Jaringan SPAM Lokasi Desa Tamarenja Kabupaten Donggala		1	Kegiat an		DGGL	2022	
	Pemeliharaan Jaringan SPAM Lokasi Desa Tayawa Kabupaten Tojo Una-una		1	Kegiat an		TOUNA	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Sub Keg :Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	240 Unit						

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pemeliharaan Instalasi SPAM Lokasi Desa Daenggune Kabupaten Sigi		1	Paket	1 Pake t	SIGI	2022	
	Pemeliharaan Instalasi SPAM Lokasi Desa Kalawara Kabupaten Sigi		1	Paket	1 Pake t	SIGI	2022	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
	Pemeliharaan Instalasi SPAM Lokasi Desa Sambo Kabupaten Sigi		1	Paket	1 Pake t	SIGI	2022	
	Pemeliharaan Instalasi WTP Lokasi Desa Oloboju Kabupaten Sigi		1	Paket	1 Pake t	SIGI	2022	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							
	-	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan, Rehab dan Pengadaan Kebutuhan satuan pendidikan	31	Seko lah	Kab/Kot a	2022	DIKBUD Prov. Sulteng (Bidang Pembinaan SMA)

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	-	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Penganggaran Bantuan diperuntukan pada masing-masing Peserta Didik sesuai kebutuhan satuan pendidikan	227	Seko lah	Kab/Kot a	2022	DIKBUD Prov. Sulteng (Bidang Pembinaan SMA)
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							
	-	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Pembangunan, Rehab dan Pengadaan Kebutuhan satuan pendidikan	33	Seko lah	Kab/Kot a	2022	DIKBUD Prov. Sulteng (Bidang Pembinaan SMK)
	-	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Penganggaran Bantuan diperuntukan pada masing-masing Peserta Didik sesuai kebutuhan satuan pendidikan	185	Seko lah	Kab/Kot a	2022	DIKBUD Prov. Sulteng (Bidang Pembinaan SMK)
	Pengelolaan Pendidikan Khusus							

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan, Rehab dan Pengadaan Kebutuhan satuan pendidikan	5	Seko lah	Kab/Kot a	2022	DIKBUD Prov. Sulteng (Bidang PKPLK)
	-	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Penganggaran Bantuan diperuntukan pada masing- masing Peserta Didik sesuai kebutuhan satuan pendidikan	30	Seko lah	Kab/Kot a	2022	DIKBUD Prov. Sulteng (Bidang PKPLK)
SUMBER DAYA MANUSIA								
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	10 Paket pelati han	160 oran g	kab. Donggal a	2022 - 2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Tengah

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	10 Paket pelati han	160 oran g	kab. Tojo Una Una	2022 - 2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Tengah
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	10 Paket pelati han	160 oran g	kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Tengah
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi	Koordinasi, sinkro nisi, dan Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan industri	2	sentra	kab donggala ,toli-toli, Banggai Laut	2022	Dinas perindustrian dan perdagangan

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						Dinas P2KB
		Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal						Dinas P2KB
		Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam	Advokasi dan Sosialisasi Kepada Stakeholder dalam upaya peningkatan capaian KB MKJP	1	Dok ume n	Tojo Una-una	2022	Dinas P2KB

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
		pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK						
		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Oranisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB						Dinas P2KB

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
		Sub Kegiatan Pengembangan strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta organisasi Kemasyarakatan dalam pelayanan dan Pembinaan kesertaan ber-KB	Penyuluhan Masyarakat dalam program KB	1	Dok ume n	Tojo Una- una, Donggal a	2023	Dinas P2KB
								Dinas P2KB

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
		PEMBERDAYAA N DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						Dinas P2KB
		Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						Dinas P2KB
		Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Remaja Tentang Generasi Berencana	Sosialisasi Cegah Nikah Dini dan Stunting (Genre) di SMA	500	oran g	Donggal a, Sigi, Tojo Una-una	2023	Dinas P2KB
		Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan	Workshop Cegah Nikah Dini fdan Stunting	1	Lapo ran	Donggal a, Sigi.	2023	Dinas P2KB

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
		Keluarga dan Remaja						
		Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling- Remaja (PIK R)	Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksanaan pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)	50	Orga nisas i	Donggal a, Sigi, Tojo Una-una	2023	Dinas P2KB
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Sosialisasi Program Fungsi Keluarga Melalui Pola Pengasuhan 1000 HPK	3	Dok ume n	Donggal a, Sigi, Tojo Una-una	2023	Dinas P2KB

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Orientasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah	1	Kegi atan	Donggal a, Sigi, Tojo Una- Una	2022 - 2026	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
			Pertemuan Penguatan Pelayanan ANC Terpadu, Pelayanan Persalinan dan Nifas Sesuai Standar di Provinsi Sulawesi Tengah	1	Kegi atan	Donggal a, Sigi, Tojo Una- Una	2022 - 2026	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
			Pertemuan Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah	1	Kegi atan	Donggal a, Sigi, Tojo Una- Una	2022 - 2026	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Pertemuan Penguatan Kualitas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah	1	Kegi atan	Donggal a, Sigi, Tojo Una- Una	2022 - 2026	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
			Pertemuan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Keluarga Berencana Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah	1	Kegi atan	Donggal a, Sigi, Tojo Una- Una	2022 - 2026	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
		-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pertemuan LP/LS terkait dalam rangka percepatan dan penurunan stunting	1	Kegi atan	Donggal a, Sigi, Tojo Una- Una	2022 - 2026	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
			Bimtek Pembinaan Program Gizi	1	Kegi atan	Donggal a, Sigi, Tojo Una- Una	2022 - 2026	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
		-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Monitoring dan Evaluasi Limbah Medis di Fasyankes	1	Kegi atan	Donggal a, Sigi, Tojo Una- Una	2022 - 2026	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
			Orientasi Penjamah Makanan	1	Kegi atan	Donggal a, Sigi, Tojo	2022 - 2026	Dinas Kesehatan Provinsi

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
						Una- Una		Sulawesi Tengah
			Orientasi Sekolah Pasar Sehat	1	Kegi atan	Donggal a, Sigi, Tojo Una- Una	2022 - 2026	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
		-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pemantauan Pengendalian Vektor dan Pembawa Penyakit	1	Kegi atan	Donggal a, Sigi, Tojo Una- Una	2022 - 2026	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
			Pembinaan Program HPISP (Diare, HEPATITIS dan Tifoid) di Kab/Kota dan Puskesmas	1	Kegi atan	Donggal a, Sigi, Tojo Una- Una	2022 - 2026	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
		-Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Pertemuan Evaluasi Program Imunisasi tingkat Provinsi Sulawesi Tengah	1	Kegi atan	Donggal a, Sigi, Tojo Una- Una	2022 - 2026	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
			Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	1	Kegi atan	Donggal a, Sigi, Tojo Una- Una	2022 - 2026	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
		-Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pertemuan Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Program JKN	1	Kegi atan	Donggal a, Sigi, Tojo Una- Una	2022 - 2026	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
			Pemantauan Kesiapan Kelas Rawat Inap Standar JKN di Rumah Sakit	1	Kegi atan	Donggal a, Sigi, Tojo Una- Una	2022 - 2026	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
			Penerima Bantuan Iuran (PBI)	1	Kegi atan	Donggal a, Sigi, Tojo Una- Una	2022 - 2026	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
			Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas	1	Kegi atan	Donggal a, Sigi, Tojo Una- Una	2022 - 2026	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	EDUKASI LITERASI INFORMASI	5	Kegi atan	Desa Talaga, Desa Siyoyong , Desa Kembay ang, Desa Panii, Des Karya Mukti	2022 - 2026	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
				5	Kegi atan	Tojo Una - Una	2022 - 2026	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
				5	Kegi atan	Sigi	2022 - 2026	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Statistik Provinsi

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
								Sulawesi Tengah
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan Protein asal Ikan	Bazar Ikan Murah dalam rangka penurunan stunting, Penyuluh / Pelatihan / Pendampingan bagi masyarakat	3	Kabu pate n	kab. Donggal a, Kab. Tojo Una- una, Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan (Nelayan)	Pendampingan kelembagaan/usa ha dan pelatihan teknis perikanan tangkap	3	Kabu pate n	kab. Donggal a, Kab. Tojo Una- una, Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengembangan sumberdaya manusia dilingkungan pendidikan	Pendampingan dan Pelatihan Teknis budidaya bagi masyarakat	3	Kabu pate n	kab. Donggal a, Kab. Tojo Una- una, Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
PEREKONOMIAN MASYARAKAT								
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dalam Kelembagaan Desa	1	Loka si	Banggai Laut	2022	DP3A Provinsi Sulawesi Tengah
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Marketing Bagi Perempuan Miskin dan Rentan (RTP)	1	Loka si	Parigi Moutong	2022	DP3A Provinsi Sulawesi Tengah
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Kelompok perempuan yang dilatih ketrampilan UP2K	4	Loka si	Banggai	2022	DP3A Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
		Kewenangan Provinsi						
						Donggal a	2022	DP3A Provinsi Sulawesi Tengah
						Parigi Moutong	2022	DP3A Provinsi Sulawesi Tengah
						Poso	2022	DP3A Provinsi Sulawesi Tengah
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA							
	Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang menjadi Kewrengan Provinsi	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Kawasan Perdesaan	162	Oran g	Kab. Donggal a / Kab. Sigi / Kab. Donggal a	2023- 2026	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
				26	Oran g	Kab. Tojo Una Una (Desa Ampana Tete)	2023	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.	Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Bimbingan Teknis Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat	10	Oran g	Kab Sigi (Desa Kalukubula)	2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Bimbingan Teknis Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat	188	Oran g	Kab. Donggala / Kab. Sigi / Kab. Donggala	2023-2026	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				32	Oran g	Kab. Tojo Una Una (Desa	2023	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
						Sansarin o)		
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Bimbingan Teknis Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	22	Oran g	Kab. Tojo Una Una (Desa Ampana Tete)	2023	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bantuan modal usaha bagi keluarga miskin dalam bentuk barang, melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perorangan.	-	122	KK	Donggal a	2022	Kepala Dinas Sosial
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Provinsi		-	350	KK	Sigi		
	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		-	6	KK	Tojo Una-una		
		Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	-	4068		Donggal a		
			-	1351		Sigi		

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
		bagi keluarga miskin dalam bentuk uang, melalui program Bantuan Tunai (BANTU).	-	1573		Tojo Una-una		
		Bantuan modal usaha bagi keluarga miskin dalam bentuk barang, melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perorangan.	-	32	KK	Donggala	2021	Kepala Dinas Sosial
			-	32	KK	Sigi		
			-	14	KK	Tojo Una-una		
	Penanggulangan Bencana							
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Terpenuhinya Kondisi Sosial Ekonomi pasca Bencana	139.382.675	3	Pokmas	Kab. Parimo	2022	BPBD

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengembangan Perikanan Tangkap di daerah tertinggal	Sarana prasarana produksi perikanan tangkap	2	Kabu pate n	kab. Donggal a, Kab. Tojo Una-una	2022 - 2026	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengembangan Perikanan Budidaya di daerah tertinggal	Sarana prasarana produksi perikanan budidaya	3	Kabu pate n	kab. Donggal a, Kab. Tojo Una- una, Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pengembangan pengolahan dan pemasaran ikan di daerah tertinggal	Sarana Prasarana Olahan	3	Kabu pate n	kab. Donggal a, Kab. Tojo Una- una, Kab. Sigi	2022 - 2026	Dinas Kelautan dan Perikanan
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH								
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa	275	Desa	Kab. Donggal a, Kab. Sigi dan Kab. Tojo Una-una	2023- 2026	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

				36	Desa	Kab. Donggala : Kec. Dampelas (Desa Talaga, Kambayan, Sabang, Budi Mukti, Karya Mukti, Sioyong, Pani'i, Malonas, Parisan Agung, Lembah Mukti, Rerang, Pongera ng), Kec. Sirenja : (Desa Dampal, Lumpio, Lende Tovea, Lende, Sibado,	2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
--	--	--	--	----	------	---	------	--

						Balintun a, Ombo, Tondo, Ujumbo u, Jonooge, Sipi) Kec. Sindue Tobata : (Desa Sikara Tobata, Alindau, Oti, Tamaren ja, Sipeso, Sindosa) Kec. Balaesa ng : Desa Labean, Lombon ga, Tambu), Kec. Balaesa ng		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						Tanjung : (Desa Walanda no), Kec. Gumbas a : (Desa Pakuli, Desa Pakuli Utara).		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
						Kab. Sigi : Kec. Tanamb ulawa (Desa Sibowi), Kec. Dolo Selatan (Desa Walatan a)		
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Bimtek Pengelolaan Aset Desa	50	Desa	Kab. Donggal a, Kab. Sigi dan Kab. Tojo Una- Una	2023- 2026	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
			Bimtek Pengelolaan Aset Desa	16	Desa	Kab. Sigi (Desa Gimpu, Banggai ba, Pakuli, Kalaman ta, Porame, Tomado, Tanah Harapan , Matanti mali)	2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Kab. Donggal a (Desa Loli Tasiburi, Labuan Salumbo ne, Tondo, Lero, Watatu, Balintu		

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
						ma, Labean)		
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi	Koordinasi,sinkro nisasi,dan Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan industri	2	sentra	kab donggala ,toli-toli, Banggai Laut	2022	Dinas perindustrian dan perdagangan
AKSESIBILITAS								
	Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Ruas Ampera - Banawa	4,7	KM	Kec. Banawa	2023	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Wilayah Kabupaten Donggala	14,1	KM	Kec. Banawa, Kec. Balaesa ng	2022 - 2026	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Ruas Kalukubula - Kalawara	15,3	KM	Kec. Dolo	2025 - 2026	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Wilayah Kabupaten Sigi	241,8 8	KM	Kec. Sigi Biomar u, Kec. Palolo, Kec. Dolo, Kec. Tanamb ulava, Kec. Gumbas a, Kec. Kulawi, Kec. Kulawi Selatan, Kec.	2022 - 2026	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
						Marawola, Kec. Dolo Barat, Kec. Dolo Selatan		
	Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Ruas Jalan Longge Atas - Dataran Bulan	10	KM	Kec. Ampana Tete	2026	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Wakai - Kulingkinari	15	KM	Kec. Una Una	2025 - 2026	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Provinsi/ Kabupaten	Program Kegiatan	Uraian Program- Kegiatan	Indikasi Kebutuhan PPDT	Volum e	Satu an	Lokasi	Tahun Anggara n	Penanggung Jawab
SARANA PRASARANA								
	Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Wilayah Kabupaten Tojo Una Una	92,71	KM	Kec. Tojo Barat, Kec. Ampana Tete, Kec. Una Una	2022 - 2026	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

BAB IV STRATEGI PEMBINAAN DAERAH TERTINGGAL TERENTASKAN

Strategi pembinaan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan bertujuan untuk mendorong daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019 menjadi daerah maju dan mandiri serta memastikan agar tidak kembali menjadi daerah tertinggal.

1. Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan Wilayah Sulawesi

Pembinaan dan keberpihakan dari kementerian/lembaga serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 (tiga) tahun (2020-2022), yang mana untuk Pulau Sulawesi Tengah berlokasi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Tolitoli.

Peningkatan daya saing di Daerah Tertinggal Terentaskan wilayah Sulawesi akan dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan. Adapun Daerah Tertinggal Terentaskan yang masuk koridor pertumbuhan adalah Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Parigi Moutong sedangkan Daerah Tertinggal Terentaskan yang masuk koridor pemerataan adalah Kabupaten Morowali Utara.

Adapun strategi pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan yakni sebagai berikut:

a. Peningkatan Daya Saing di Daerah Tertinggal Terentaskan

1. optimalisasi pengelolaan sumber daya, melalui pengembangan industri, peningkatan nilai tambah prukades, pengembangan desa wisata, penyediaan alat pascapanen produk unggulan, promosi dan kemitraan komoditi unggulan antara lain kelapa, cengkeh, kakao, kelapa sawit, lada, perikanan, dan pariwisata alam;
2. pengembangan kawasan strategis ekonomi, industri dan pariwisata secara terintegrasi dan terkoneksi dengan wilayah sekitar antara lain pengembangan KPPN melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan BUM Desa Bersama di KPPN Buol (Kawasan Perdesaan Agropolitan Lipunoto), Kawasan Transmigrasi Air Terang di Kabupaten Buol, Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong, Kawasan Transmigrasi;

3. membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi dalam rangka membuka akses daerah seluas-luasnya, melalui pembangunan terminal dan fasilitas bandara di Kabupaten Tolitoli, pelayanan transportasi laut trayek perintis R-49, R-52 di Kabupaten Parigi Moutong, R-57 di Kabupaten Morowali Utara, preservasi jalan untuk memperlancar arus barang, jasa, manusia, dan menjadi penghubung yang efisien antara sumber bahan baku, pusat produksi dan pasar, pengembangan gardu induk di Kabupaten Parigi Moutong untuk penyediaan listrik yang memadai dan menjadi insentif untuk membangun industri serta memperluas jangkauan pemasaran dan distribusi, penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi antara lain BTS/ Lastmile untuk memudahkan arus informasi dengan lebih luas dan cepat antara lain pengembangandan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi melalui pembangunan Jalan Trans Sulawesi dan jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, yaitu pengembangan Bandara Pahuwato, pengembangan Bandara Banggai Laut serta pembangunan dermaga;
4. mendorong aktivitas perekonomian daerah, melalui fasilitasi pengembangan IKM/KUKM, pengembangan manajemen koperasi, dan penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik yang mendukung iklim investasi;
5. peningkatan kapasitas keuangan daerah dan tata kelola keuangan daerah melalui fasilitasi peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah, dan fasilitasi penerapan belanja APBD yang berorientasi pada SPM pelayanan dasar;
6. peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk meningkatkan produktivitas pemerintah daerah melalui bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan aset desa, pelatihan aparat pemerintah desa dan pengurus kelembagaan masyarakat desa, serta penguatan kelembagaan pemerintah desa; dan
7. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan, melalui pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan pusat perencanaan dan pendayagunaan SDM di Kabupaten Buol, diseminasi informasi mengenai stunting, pembinaan gizi masyarakat, peningkatan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas, pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan vokasi, dan program literasi digital

- b. Peningkatan Layanan Dasar dan Pemenuhan SPM di Daerah Tertinggal Terentaskan
1. pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan serta pendayagunaan teknologi informasi untuk pembelajaran antara lain Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli Toli,
 2. penyediaan sarana-prasarana kesehatan dasar antara lain Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tolitoli,
 3. pengembangan jaringan irigasi permukaan, rawa, dan nonpadi;
 4. penanganan potensi bencana dengan pengendalian banjir, lahar, dan pengamanan pantai; dan
 5. peningkatan akses dan kualitas dalam perluasan dan peningkatan pelayanan dasar pada masyarakat.

STRADA-PPDT Tahun 2022-2026 diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan penyusunannya berpedoman pada RPJMD 2021-2026. STRADA PPDT Tahun 2022-2026 berpedoman pada STRANAS-PPDT terdiri dari batang tubuh beserta lampirannya yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II isu, Kebijakan, dan Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bab III Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bab IV Program-Kegiatan Strategis Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang sekaligus memuat matriks kegiatan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui pendanaan APBN dan APBD Provinsi, Bab V Strategi Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan, serta Bab VI Penutup.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, terdapat 62 (enam puluh dua) kabupaten daerah tertinggal tahun 2020-2024 yang tersebar di 5 (lima) wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Untuk itu dalam wilayah Sulawesi khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat tiga wilayah yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tojo Una-Una Perumusan program dan kegiatan di 3 (tiga) daerah tertinggal tersebut yang berangkat dari usulan masing-masing daerah tertinggal yang kemudian diafirmasi oleh program dan kegiatan dari kementerian/lembaga, dan perangkat daerah dengan mempertimbangkan prioritas intervensi di masing-masing daerah tertinggal yang merujuk pada 22 (dua puluh dua) indikator penyebab ketertinggalan dari 6 (enam) kriteria (perekonomian wilayah, sarana-prasarana, sumber daya manusia, aksesibilitas, kemampuan keuangan daerah, dan karakteristik daerah).

Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT), dan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT) Provinsi dan Kabupaten, Pelaksanaan program percepatan pembangunan daerah tertinggal di Sulawesi Tengah diprioritaskan pada:

- a) Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Daerah Tertinggal;
- b) Pengembangan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengembangan Produk-Produk Unggulan;
- c) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Unggul; dan
- d) Peningkatan Infrastruktur Penunjang Dan Konektivitas Antar Wilayah Daerah Tertinggal. Penyusunan dokumen Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2022-2026 Provinsi Sulawesi Tengah disusun Secara Sistematis, Terarah, Terpadu dan Tanggap Perubahan.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen STRADA-PPDT akan dituangkan kembali dalam Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) ini maka pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan selain pemberdayaan masyarakat secara langsung juga perlu adanya harmonisasi dan koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten tertinggal.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, SH., M.SI
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19740610 200003 1 007